BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Harian Republika belum objektif secara keseluruhan dalam memberitakan konflik antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM. Belum objektifnya Harian Republika tersebut dapat dilihat dari hasil penghitungan terhadap 11 sub unit analisis yang meliputi faktualitas, verifikasi, percampuran opini dan fakta, relevansi narasumber dengan pemberitaan, kandungan nilai berita, Relevansi Judul dengan Isi Berita, unsur pelengkap, kelengkapan unsur 5W+1H, sensasionalisme, *cover both side*, dan *even handed evaluation*.

Dari 11 sub unit analisis, ada 8 sub unit analisis yang persentasenya mendekati objektif pada Harian Republika. Delapan unit analisis yang mendekati objektif meliputi verifikasi, percampuran opini dan fakta, relevansi narasumber dengan isi berita, relevansi nilai berita, Relevansi Judul dengan Isi Berita, kelengkapan 5W+1H, sensasionalisme, dan *even handed evaluation*. Harian Republika telah melakukan verifikasi sebesar 95% dengan terdapatnya pencantuman nama narasumber, jabatan, tempat terjadinya peristiwa, serta waktu terjadinya peristiwa. Kemudian sebesar 81% berita tidak mencampurkan opini dan fakta, 92% berita sudah relevan antara narasumber dengan isi berita, 97% nilai berita yang mengarah pada *significance*, dan sebanyak 95% berita sudah memiliki

kesesuaian antara judul dan isinya. Pada sub unit analisis kelengkapan, 68% berita disajikan dengan 5W+1H secara lengkap, 78% berita tidak disajikan secara sensasional, serta 70% memberitakan konflik secara netral.

Masih terdapat 3 sub unit analisis yang masih jauh mendekati objektivitas yaitu pada kategori bahan baku berita, unsur pelengkap, dan keseimbangan dalam menyajikan berita (cover both side). Pada kategori factualness (bahan baku berita), 84% berita dibuat berdasarkan opini-opini narasumber saja. Hanya sedikit fakta di lapangan yang disajikan. Ketidaklengkapan unsur pelengkap yang bertujuan untuk memperjelas informasi yang disajikan juga masih belum memenuhi syarat objektivitas. Pada sub unit analisis cover both side, 64% berita masih dibuat berdasarkan sudut pandang dari salah satu pihak tertentu saja yaitu PKS. Penyajian secara satu sisi ini mendominasi artikel berita-berita yang menjadi populasi sekaligus sampel dalam penelitian. Tipe peliputan satu sisi ini menyebabkan pemberitaan tidak dapat melihat kasus secara lebih luas dari berbagai narasumber.

Penyajian berita pada Harian Republika perlu diperbaiki agar pemberitaan yang disajikan semakin mendekati objektivitas. Pemberitaan kasus konflik PKS dan Partai Demokrat ini hanya dari satu sisi saja, yaitu dari pihak PKS, tanpa ingin melihat dari sudut pandang berbagai narasumber, meskipun nada pemberitaan dalam kasus ini cenderung netral pada Harian Republika. Pemberitaan pada Harian Republika mengenai kasus konflik PKS dan Partai Demokrat ini lebih mengarah pada bagaimana kasus tersebut berkembang.

Namun yang menjadi kekurangan dari Harian Republika adalah sebagian besar pengambilan informasi yang bukan berdasarkan fakta di lapangan. Sebagian besar, Harian Republika hanya mengutip pernyataan-pernyataan dari narasumber saja tanpa menyajikan secara detail bagaimana konflik yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Harian Republika masih memasukkan opini di dalam pemberitaan. Selain itu, ada pada bagian sebuah berita yang tidak mencantumkan narasumber yang mengutarakan pendapat, dan masih ditemukannya ketidaksesuaian antara narasumber yang dipilih dengan isi berita yang disajikan.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian dengan meninjau dari objektivitasnya sudah sangat banyak, sehingga tidak terdapat lagi sesuatu terbaru yang dapat dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini tetap dilakukan karena peneliti tertarik dengan kesamaan basis yang melatarbelakangi media dan objek penelitian. Akan lebih baik jika pada penelitian-penelitian selanjutnya ditinjau dari sisi penerapan jurnalisme damai yang pada akhirnya mampu melihat penyelesaian dari kasus konflik seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anto, J. 2007. Meretas Jurnalisme Damai di Aceh. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga
- Eriyanto. 2011. Analisis Isi:Pengantar Metodologi untuk Penelitian IlmuKomunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fauzi, Arifatul Choiri. 2007. Kabar-*Kabar Kekerasan dari Bali*. Yogyakarta: LKiS.
- Ishwara, Luwi. 2005. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Kovach dan Rosenstiel. 2006. Sembilan Elemen Jurnalisme. Jakarta: Yayasan Pantau
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group
- Kusumaningrat dan Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- McQuail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London:Sage Publications Ltd.

Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers

Sumadiria, AS. Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature,*PanduanPraktis Jurnalis Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya

Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius

Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika

Internet

Wahyudi, Albi. 2013. *Ini Alasan Pemerintah Harus Naikkan BBM Subsidi*. (diakses pada 12 Maret 2014 pukul 11.15 WIB dari http://jaringnews.com/ekonomi/umum/43464/ini-alasan-pemerintah-harus-naikkan-bbm-subsidi)

Handaka, Hermawan. 2013. *Harga BBM Naik, Supir Angkot Resah*. (diakses pada 12 Maret 2014 pukul 12.45 dari http://www.tribunnews.com/regional/2013/06/20/harga-bbm-naik-sopir-angkot-resah)

Amri, Arfi Bambani dan Adam, Mohammad. 2009. *Demokrat Juara, PKS Partai Islam Terbesar*. (diakses pada 13 Maret 2014 pukul 13.30 dari http://politik.news.viva.co.id/news/read/42363-demokrat_juara
pks-partai-islam_terbesar)

http://www.poltracking.com/produk/riset-dan-survei/738-prediksi-elektabilitaspartai-pada-pemilu-2014-dan-tone-pemberitaan-15-media-mainstream-padamasa-kampanye diakses pada Rabu 7 Mei 2014 pukul 13.19 WIB

http://www.demokrat.or.id/visi-misi/ diakses pada Kamis 29 Mei 2014 pukul 20.44 WIB

Faqih, Mansyur. 2012. *PKS Beri Lima Opsi Harga BBM ke SBY*. (diakses pada Senin 12 Mei 2014 pukul 17.04 WIB dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/28/m1ks5e-pks-beri-lima-opsi-harga-bbm-ke-sby)

http://www.republika.co.id/page/aboutdiakses pada Selasa, 23 September 2014 pukul 15.30 WIB

Perdana, M. Andi. *Fraksi PKS Tegaskan Tolak Kenaikan Harga BBM*. (diakses pada Kamis 16 Oktober 2014 pukul 13.50 WIB dari http://www.tempo.co/read/news/2012/03/30/090393580/Fraksi-PKS-Tegaskan-Tolak-Kenaikan-BBM)

Harera, Muhammad Mirza. 2013. *Kasar Tertibkan Demo BBM, Polisi Diadukan ke Komnas HAM*. (diakses pada Kamis 30 Oktober 2014 pukul 10.00 WIB dari http://www.merdeka.com/peristiwa/kasar-tertibkan-demo-bbm-polisi-diadukan-ke-komnas-ham.html)

Jurnal Ilmiah

Jati, Birgitta Bestari Puspita. 2011. 'Kecenderungan Objektifitas Pemberitaan Epidemi Virus H5N1 dalam International Herald Tribune Online'. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.8, Juni, hal:1-16. FISIP UAJY.

Darmawan, Josep J., dan Jati, Birgitta Bestari Puspita. 2012. 'Kecenderungan Pemberitaan tentang Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di SKH Jawa Pos dan SKH Kompas'. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.9, Desember, hal:99-122. FISIP UAJY.

Skripsi Tidak Dipublikasikan

Natalis, Christian. 2013. Pemberitaan Upaya Palestina Menjadi Anggota PBB (Analisis Isi Kuantitatif Media tentang Objektifitas Pemberitaan Palestina Menjadi Anggota PBB pada Surat Kabar Harian Kompas dan Jawa Pos Periode 15 September-15 November 2011). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Atma Jaya Yogyakarta.Skripsi.

Sari, Stephani Arum. 2013. Pemberitaan Partai Nasional Demokrat dalam Surat Kabar Harian Seputar Indonesia (Analisis Isi Kuantitatif Objektifitas Pemberitaan Partai Nasional Demokrat dalam Surat Kabar Harian Seputar Indonesia Periode Oktober 2011-Februari 2013). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Widyaninggar, Veronika Sekar Hayu. 2014. *Pemberitaan Kongres Luar Biasa* Partai Demokrat *pada Harian Jurnal Nasional dan Harian Kompas (Analisis Isi Kauntitatif Objektifitas Pemberitaan Kongres Luar Biasa* Partai Demokrat *pada Harian Jurnal Nasional dan Harian Kompas Periode 1 Maret-5 April 2013*). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Lain-Lain

(**pdf**) Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 2008. *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta

(pdf) Keller, Annet. 2009. *Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika* (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/09806.pdf)). Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (diakses pada Senin, 22 September 2014 pukul 13.02 WIB





Coding Sheet

Konflik Antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang Kenaikan Harga BBM (Analisis Isi Kuantitatif Objektivitas Pemberitaan Konflik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang Kenaikan Harga BBM pada Harian Republika Periode Maret 2012-Juni 2013)

Nama *Coder* : Tanggal Berita : Judul Berita :

Dimensi Faktualitas

1. Fakta yang digunakan sebagai bahan baku berita

a. Fakta Sosiologis b. Fakta Psikologis

2. Verifikasi data pada artikel berita

a. Ada b. Tidak Ada

3. Unsur Percampuran opini dan fakta dalam artikel berita

a. Ada b. Tidak Ada

4. Unsur Kelengkapan 5W+1H dalam artikel berita

a. Lengkap b. Tidak Lengkap

5. Relevansi narasumber dengan artikel berita

a. Relevan b. Tidak Relevan

6. Arah peliputan berita berdasarkan nilai berita

a. Mengarah ke *Significance* b

b. Mengarah ke Human Interest

7. Relevansi Judul dengan Isi Berita

a. Sesuai b. Tidak Sesuai

8. Unsur pelengkap yang memperjelas informasi (foto, gambar, grafik, tabel)

a. Ada b. Tidak Ada

Dimensi Imparsialitas

9. Tipe peliputan dalam berita

a. Satu Sisi b. Dua Sisi

c. Multi Sisi

c. Netral

10. Nada pemberitaan terhadap Partai Keadilan Sejahtera

a. Positif b. Negatif

11. Sensasionalisme dalam berita

a. Ada b. Tidak Ada

REKAP PENGKODINGAN

Sub Unit Analisis: Faktualitas

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	В	В	В
2	Masih Ragu	A	В	A
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	A	В	A
4	PKS Surati SBY	В	В	В
5	Surat PKS Dilebihkan	В	В	В
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	A	В	В
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	В	В	В
8	Nasib PKS di Tangan SBY	В	В	В
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	В	В	В
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	В	В	В
11	Tiga Opsi Untuk PKS	В	В	В
12	Menteri PKS Berkurang Satu	В	В	В
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	В	В	В
14	SBY Takut PKS Besar	В	В	В
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	В	В	В
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	В	В	В
17	Ketidakpastian Jadi Beban	В	В	В
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	В	В	A
19	PKS Segera Tentukan Sikap	В	В	В
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	A	В	A
21	Istana Bantah Depak PKS	В	В	В
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	В	В	В
23	Menteri PKS Terkunci	В	В	В
24	Internal PKS Saling Tuding	В	В	В
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	В	В	В
26	PKS Klaim Diamankan SBY	В	В	В
27	Menteri PKS Bertahan	В	В	В
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	В	В	В
29	PKS-PD Makin Panas	A	A	A
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	В	В	В
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	A	A	A
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	В	В	В
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	В	В	В
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	В	В	В
35	Setgab Keluarkan PKS	В	В	A
36	Sikap PKS Sudah Tepat	В	В	A
37	PKS Didepak, Menteri Aman	В	В	A

Sub Unit Analisis: Verifikasi

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	A	A	A
2	Masih Ragu	A	A	A
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	A	A	A
4	PKS Surati SBY	A	A	A
5	Surat PKS Dilebihkan	A	A	A
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	A	A	A
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	A	A	A
8	Nasib PKS di Tangan SBY	A	A	A
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	A	A	A
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	A	A	A
11	Tiga Opsi Untuk PKS	A	A	A
12	Menteri PKS Berkurang Satu	A	A	A
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	A	A	A
14	SBY Takut PKS Besar	A	A	A
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	A	A	A
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	В	A	A
17	Ketidakpastian Jadi Beban	A	A	A
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	A	A	A
19	PKS Segera Tentukan Sikap	A	A	A
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	В	A	A
21	Istana Bantah Depak PKS	A	A	A
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	A	A	A
23	Menteri PKS Terkunci	A	A	A
24	Internal PKS Saling Tuding	A	A	A
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	A	A	A
26	PKS Klaim Diamankan SBY	A	A	A
27	Menteri PKS Bertahan	A	A	A
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	A	A	A
29	PKS-PD Makin Panas	A	A	A
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	A	A	A
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	A	A	A
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	A	A	A
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	A	A	A
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	A	A	A
35	Setgab Keluarkan PKS	A	A	A
36	Sikap PKS Sudah Tepat	A	A	A
37	PKS Didepak, Menteri Aman	A	A	A

Sub Unit Analisis: Percampuran Opini dan Fakta

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	В	В	В
2	Masih Ragu	В	В	A
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	A	В	В
4	PKS Surati SBY	В	В	В
5	Surat PKS Dilebihkan	В	В	В
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	В	В	В
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	A	В	A
8	Nasib PKS di Tangan SBY	В	В	A
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	В	В	В
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	В	В	A
11	Tiga Opsi Untuk PKS	В	В	В
12	Menteri PKS Berkurang Satu	В	В	В
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	В	В	В
14	SBY Takut PKS Besar	В	В	В
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	В	В	В
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	A	В	A
17	Ketidakpastian Jadi Beban	В	В	В
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	В	В	В
19	PKS Segera Tentukan Sikap	В	В	В
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	В	В	A
21	Istana Bantah Depak PKS	В	В	В
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	В	В	В
23	Menteri PKS Terkunci	В	В	В
24	Internal PKS Saling Tuding	В	В	В
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	В	В	В
26	PKS Klaim Diamankan SBY	В	В	В
27	Menteri PKS Bertahan	В	В	В
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	A	A	A
29	PKS-PD Makin Panas	В	В	В
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	A	A	A
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	В	В	В
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	A	В	В
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	В	В	В
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	В	В	В
35	Setgab Keluarkan PKS	В	В	A
36	Sikap PKS Sudah Tepat	A	В	A
37	PKS Didepak, Menteri Aman	В	В	В

Sub Unit Analisis: Kelengkapan (Completeness)

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	В	В	В
2	Masih Ragu	A	A	A
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	A	A	A
4	PKS Surati SBY	В	В	В
5	Surat PKS Dilebihkan	A	A	A
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	В	В	В
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	A	A	A
8	Nasib PKS di Tangan SBY	A	A	A
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	A	A	A
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	A	A	A
11	Tiga Opsi Untuk PKS	В	В	A
12	Menteri PKS Berkurang Satu	A	A	A
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	A	A	A
14	SBY Takut PKS Besar	A	A	A
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	A	A	A
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	A	В	A
17	Ketidakpastian Jadi Beban	A	A	A
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	A	A	A
19	PKS Segera Tentukan Sikap	A	A	A
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	В	В	В
21	Istana Bantah Depak PKS	В	В	В
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	A	A	В
23	Menteri PKS Terkunci	A	A	A
24	Internal PKS Saling Tuding	A	A	A
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	A	A	A
26	PKS Klaim Diamankan SBY	A	A	A
27	Menteri PKS Bertahan	A	A	A
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	В	В	В
29	PKS-PD Makin Panas	A	A	A
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	В	В	В
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	В	A	В
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	В	В	В
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	В	В	В
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	A	A	A
35	Setgab Keluarkan PKS	A	A	A
36	Sikap PKS Sudah Tepat	В	В	В
37	PKS Didepak, Menteri Aman	A	A	A

Sub Unit Analisis: Relevansi narasumber dengan Berita

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	A	В	A
2	Masih Ragu	A	A	A
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	В	В	A
4	PKS Surati SBY	A	A	A
5	Surat PKS Dilebihkan	A	A	A
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	В	В	A
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	A	A	A
8	Nasib PKS di Tangan SBY	A	A	A
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	A	A	A
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	A	A	A
11	Tiga Opsi Untuk PKS	A	A	A
12	Menteri PKS Berkurang Satu	A	A	A
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	A	A	A
14	SBY Takut PKS Besar	A	A	A
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	A	В	A
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	A	В	A
17	Ketidakpastian Jadi Beban	A	В	A
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	A	В	A
19	PKS Segera Tentukan Sikap	A	A	A
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	A	В	A
21	Istana Bantah Depak PKS	A	A	A
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	A	A	A
23	Menteri PKS Terkunci	A	В	A
24	Internal PKS Saling Tuding	A	A	A
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	A	A	A
26	PKS Klaim Diamankan SBY	A	A	A
27	Menteri PKS Bertahan	A	A	A
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	A	A	A
29	PKS-PD Makin Panas	A	A	A
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	A	A	A
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	A	A	A
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	A	A	A
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	A	A	A
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	A	A	A
35	Setgab Keluarkan PKS	A	A	A
36	Sikap PKS Sudah Tepat	В	В	A
37	PKS Didepak, Menteri Aman	A	A	A

Sub Unit Analisis: Nilai Berita

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	A	A	A
2	Masih Ragu	A	A	A
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	A	A	A
4	PKS Surati SBY	A	В	A
5	Surat PKS Dilebihkan	В	В	В
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	A	A	A
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	A	A	A
8	Nasib PKS di Tangan SBY	A	A	A
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	A	A	A
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	A	A	A
11	Tiga Opsi Untuk PKS	A	A	A
12	Menteri PKS Berkurang Satu	A	A	A
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	A	A	A
14	SBY Takut PKS Besar	A	A	A
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	A	A	A
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	A	A	A
17	Ketidakpastian Jadi Beban	A	A	A
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	A	A	A
19	PKS Segera Tentukan Sikap	A	A	A
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	A	A	A
21	Istana Bantah Depak PKS	A	A	A
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	A	A	A
23	Menteri PKS Terkunci	A	A	A
24	Internal PKS Saling Tuding	A	A	A
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	A	A	A
26	PKS Klaim Diamankan SBY	A	A	A
27	Menteri PKS Bertahan	A	A	В
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	A	A	A
29	PKS-PD Makin Panas	A	A	A
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	A	A	A
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	A	A	A
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	A	A	A
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	A	A	A
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	A	A	A
35	Setgab Keluarkan PKS	A	A	A
36	Sikap PKS Sudah Tepat	A	A	A
37	PKS Didepak, Menteri Aman	A	A	A

Sub Unit Analisis: Relevansi Judul dengan Isi Berita

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	A	A	A
2	Masih Ragu	A	В	A
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	A	A	A
4	PKS Surati SBY	A	A	A
5	Surat PKS Dilebihkan	A	A	A
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	A	A	A
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	A	A	A
8	Nasib PKS di Tangan SBY	A	A	A
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	A	A	A
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	A	A	A
11	Tiga Opsi Untuk PKS	A	A	A
12	Menteri PKS Berkurang Satu	A	A	A
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	A	A	A
14	SBY Takut PKS Besar	A	A	A
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	A	A	A
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	A	A	A
17	Ketidakpastian Jadi Beban	A	A	A
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	A	В	A
19	PKS Segera Tentukan Sikap	A	A	A
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	A	A	A
21	Istana Bantah Depak PKS	A	A	A
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	A	A	A
23	Menteri PKS Terkunci	A	A	A
24	Internal PKS Saling Tuding	A	A	A
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	A	A	A
26	PKS Klaim Diamankan SBY	A	В	A
27	Menteri PKS Bertahan	A	A	A
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	В	В	A
29	PKS-PD Makin Panas	A	A	A
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	A	A	A
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	A	A	A
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	A	A	A
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	A	A	A
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	A	A	A
35	Setgab Keluarkan PKS	В	В	В
36	Sikap PKS Sudah Tepat	A	A	A
37	PKS Didepak, Menteri Aman	A	A	A

Sub Unit Analisis: Informativeness

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	A	В	В
2	Masih Ragu	A	A	В
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	В	В	A
4	PKS Surati SBY	В	В	В
5	Surat PKS Dilebihkan	В	В	В
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	В	В	В
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	A	A	A
8	Nasib PKS di Tangan SBY	A	A	A
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	В	В	В
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	В	В	В
11	Tiga Opsi Untuk PKS	В	В	В
12	Menteri PKS Berkurang Satu	В	В	В
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	В	В	В
14	SBY Takut PKS Besar	В	В	В
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	В	В	В
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	В	В	В
17	Ketidakpastian Jadi Beban	A	A	A
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	В	В	В
19	PKS Segera Tentukan Sikap	В	В	В
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	В	В	В
21	Istana Bantah Depak PKS	A	A	A
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	В	В	В
23	Menteri PKS Terkunci	A	A	A
24	Internal PKS Saling Tuding	A	A	A
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	В	В	В
26	PKS Klaim Diamankan SBY	A	A	A
27	Menteri PKS Bertahan	В	В	В
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	В	В	В
29	PKS-PD Makin Panas	A	A	A
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	В	В	В
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	В	В	В
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	A	A	A
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	В	В	В
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	В	В	В
35	Setgab Keluarkan PKS	A	A	A
36	Sikap PKS Sudah Tepat	В	В	В
37	PKS Didepak, Menteri Aman	В	В	В

Sub Unit Analisis: Cover Both Side

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	С	С	С
2	Masih Ragu	В	С	С
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	A	A	C
4	PKS Surati SBY	В	В	В
5	Surat PKS Dilebihkan	В	В	В
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	C	С	C
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	С	C	С
8	Nasib PKS di Tangan SBY	C	С	С
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	В	С	С
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	В	С	В
11	Tiga Opsi Untuk PKS	С	С	С
12	Menteri PKS Berkurang Satu	С	С	С
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	С	С	С
14	SBY Takut PKS Besar	С	С	С
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	A	A	A
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	A	A	A
17	Ketidakpastian Jadi Beban	С	С	С
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	A	С	A
19	PKS Segera Tentukan Sikap	A	A	A
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	С	С	С
21	Istana Bantah Depak PKS	A	С	В
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	С	С	С
23	Menteri PKS Terkunci	С	С	В
24	Internal PKS Saling Tuding	A	A	A
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	В	В	С
26	PKS Klaim Diamankan SBY	С	C	С
27	Menteri PKS Bertahan	A	A	A
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	С	A	В
29	PKS-PD Makin Panas	С	С	С
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	С	A	В
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	С	С	С
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	С	С	С
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	В	В	В
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	В	В	В
35	Setgab Keluarkan PKS	В	С	С
36	Sikap PKS Sudah Tepat	A	A	A
37	PKS Didepak, Menteri Aman	В	В	В

Sub Unit Analisis: Even Handed Evaluation

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	С	С	С
2	Masih Ragu	С	С	C
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	С	С	C
4	PKS Surati SBY	В	С	В
5	Surat PKS Dilebihkan	A	A	A
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	C	C	C
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	В	C	В
8	Nasib PKS di Tangan SBY	C	C	В
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	С	C	C
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	C	С	В
11	Tiga Opsi Untuk PKS	С	C	С
12	Menteri PKS Berkurang Satu	С	C	С
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	С	С	С
14	SBY Takut PKS Besar	A	A	A
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	С	A	С
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	В	С	В
17	Ketidakpastian Jadi Beban	С	С	С
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	С	С	С
19	PKS Segera Tentukan Sikap	A	A	A
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	В	С	С
21	Istana Bantah Depak PKS	С	С	С
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	С	С	С
23	Menteri PKS Terkunci	С	С	В
24	Internal PKS Saling Tuding	С	В	С
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	С	C	В
26	PKS Klaim Diamankan SBY	A	A	A
27	Menteri PKS Bertahan	С	A	A
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	A	A	В
29	PKS-PD Makin Panas	С	C	С
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	В	A	В
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	С	С	С
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	С	С	С
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	С	С	С
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	С	С	С
35	Setgab Keluarkan PKS	С	С	С
36	Sikap PKS Sudah Tepat	A	A	A
37	PKS Didepak, Menteri Aman	С	С	С

Sub Unit Analisis: Sensasionalisme

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1	Setgab Pecah Soal BBM	В	A	В
2	Masih Ragu	A	A	A
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	В	A	В
4	PKS Surati SBY	A	A	В
5	Surat PKS Dilebihkan	A	A	В
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	В	В	В
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	В	В	В
8	Nasib PKS di Tangan SBY	A	A	В
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	В	В	В
10	Sanksi Reshuffle Ancam PKS	В	В	В
11	Tiga Opsi Untuk PKS	В	В	В
12	Menteri PKS Berkurang Satu	В	В	В
13	PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle	В	В	В
14	SBY Takut PKS Besar	В	A	В
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	A	A	В
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	В	В	В
17	Ketidakpastian Jadi Beban	В	В	В
18	Wapres Berharap Koalisi Kompak	В	В	В
19	PKS Segera Tentukan Sikap	В	В	В
20	Setgab Tunggu Sikap PKS	В	В	В
21	Istana Bantah Depak PKS	A	A	В
22	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	В	В	В
23	Menteri PKS Terkunci	В	В	В
24	Internal PKS Saling Tuding	В	A	В
25	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	В	В	В
26	PKS Klaim Diamankan SBY	A	A	A
27	Menteri PKS Bertahan	В	A	В
28	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	В	A	В
29	PKS-PD Makin Panas	A	A	В
30	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	В	В	В
31	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	В	В	В
32	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	В	В	В
33	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	В	В	В
34	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	В	В	В
35	Setgab Keluarkan PKS	В	A	В
36	Sikap PKS Sudah Tepat	В	В	В
37	PKS Didepak, Menteri Aman	В	A	В



Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada media di gedung DPR, arga BBM.

rifikasi

rdakwa kasus Wisma Atlet M azaruddin, Elza Syarief, yang ga menjabat sebagai ketua DPP ertai Hanura tidak beralasan. Palnya, Elza sudah berprofesi segai pengacara sebelum Partai ≥mokrat lahir dan jauh sebelum 3Y jadi presiden.

Sementara itu, Wasekje., Partai emokrat, Ramadhan Pohan, mentakan komentar yang dilancarkan Wiranto belakangan ini bukan bagai serangan, melainkan sebagai

spons. "Justru yang memulai -da-Wiranto sendiri. Saya sekadar erespons komentar Wiranto soal rno-demo yang tendensi anarkistis ın eksistensi pemerintahan SBY,"

tanya, Senin kemarin.

Ia juga bersikeras rencana monstrasi menjelang kenaikan irga BBM mendapat persetujuan iranto. Kata Ramadhan, mestinya iranto tidak mendorong demonrasi untuk menjatuhkan pemeatah: Selain tudingannya kepada iranto ini, Ramadhan juga melai Hanura, melalui pengacara azaruddin, Elza Syarif, sengaja rniat menjatuhkan citra Partai ernokrat. # ed: fitriyan zamzami

Setgab Pecah Soal BBM

■ A Syalabi Ichsan, Fernan Rahadi

Pertemuan dengan Wapres tak menyeragamkan parpol koalisi soal kenaikan harga BBM.

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono melakukan pertemuan dengan para pimpinan parpol anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) soal rencana kenaikan harga BBM, Ahad (4/3) malam. Pertemuan ini belum bisa menyeragamkan pendapat parpol-parpol koalisi

Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal mengatakan, sikap PKS akan sama seperti apa yang dinyatakan beberapa waktu lalu, terlepas dari pertemuan Ahad malam. "Sikap sudah dilakukan kemarin-kemarin kalau kita menolak kenaikan,"ungkap Mustafa saat dihubungi Republika, Senin (5/3).

Mustafa mengungkapkan, pertemuan dadakan yang diadakan Ahad itu tidak untuk mengutarakan sikap masing-masing fraksi apakah akan menolak atau menerima opsi yang ditawarkan pemerintah. Menurutnya, pertemuan itu masih mengagendakan keterangan pemerintah tentang rencana-rencana seputar isu kenaikan harga BBM

Menurut Mustafa, pertemuan tersebut merupakan pertemuan awal antara pemerintah dan Setgab tentang BBM menyikapi situasi kondisi yang sudah berkembang, "Ini baru pertama kali setelah isu kenaikan menguat setelah hampir setahun lebih tidak ada perte-" ujarnya

Walaupun begitu, sikap PKS ini tak mutlak. Soal penolakan kenaikan BBM atau menerima masih akan dibahas dalam rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS yang saat ini tengah berlang sung. Kalaupun hasil Rakornas PKS akhirnya menyetujui kenaikan harga BBM, ada sejumlah persyaratan yang akan diajukan ke pemerintah. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah serius dan menunjukkan komitmennya untuk menata dan memperbaiki sarana dan sistem transportasi umum yang saat ini masih jauh dari ideal.

Menurut Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, pertemuan Ahad malam memang tak ditujukan untuk menyamakan pendapat soal kenaikan BBM. "Sebatas menyamakan persepsi saja. Supaya semua pimpinan partai koalisi tahu mengenai rencana tersebut," kata Yopie Hidayat, saat dihubungi Republika, Senin sore. Yopie melanjutkan, tidak ada kesimpulan khusus yang dihasilkan rapat tersebut:

Wakii Sekretaris Fraksi Partai Ama nat Nasional Viva Yoga Mauladi meminta agar pertemuan antara Sekretariat Gabungan dan Wakil Presiden Budiono ini tidak dipolitisasi. Menurut Yoga sikap untuk mengambil opsi kenaikan BBM sudah disepakati antara pemerintah dan DPR.

"Ini kan sudah selesai. Jangan dipolitisasi," ungkapnya saat dihubungi Republika, kemarin. Menurutnya, pertemuan yang terjadi Ahad lalu sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah dan partai politik koalisi. Dia meminta kepada partai politik peserta koalisi yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM untuk menyuarakan sikap se-cara resmi di DPR, bukan di media atau dalam pertemuan dengan Wapres tersebut. "Jangan pada awalnya mendukung, tetapi saat kebijakan akan diambil kemudian menolak untuk mendapat simpati rakyat," kata dia

Di luar koattsi, PDIP tegas menya takan menolak rencapa kenaikan BBM Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait me ngatakan, kenaikan BBM akan memancing nasknya hanza harang-barang lainnya dan menyengsarakan rakyat. "Ini belum dinaikkan semua barang sudah naik," ungkapnya. Maruarar meminta supaya pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tetap kreatif untuk mencari sumber baru pendapatan negara Selain itu, tuturnya, pemerintah harus mau berhemat demi subsidi untuk BBM.

Mengomentari pertemuan Wapres dengan parpol koalisi, Maruarar meminta pemerintah tidak menekan partai politik penyokong pemerintah yang menolak kenaikan harga BBM "Jangan sampai mematikan demokrasi, "tegas politisi yang akrab disapa Ara ini, Senin (5/3).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Ge rindra Fadli Zon mengatakan, partainya juga menolak kenaikan bahan bakar minyak "Sesuai konsiitusi, penghitungan harga BBM tak boleh tergantung mekanisme pasar." = ed: fitriyan zamzami

March

Heatting

Skenario Voting

Esthi Maharani, Erdy Nasrul

· 日本古古古子 日日本年本年日十日

Cikeas Parpol koalisi tak seragam menanggapi pertemuan di

mensikkun harga bahan bakar tal-nyak (BHM) bersubstid. Prouden Suhasil maksimul silo Bambang Yudhoyene turun lang-sung agar rencana ini berjalan mulus letapi upayanya belum membuahkan JAKARTA Pemerintaly makin diskungan untuk

Indah menjadi saksi pertemuan Presi-den dengan ketua umum dun sekjen Rabu (14/3) malam. Presiden melalui enam parpot anggota konitat pada Kediaman Presiden di Puri Cikeus Keuangan dan Menters

2

ESDM menjelaskan rencana peme-rintah dalam APBN 2012, khusus-nya mengenai kenaikin harga BBM Kondisi perekononian global ter-

kini membuat Presidet menyeru para petinggi parpol koshti agar peduli bugi magaerakat yang terdampak kepada penyelamatan perekonomian nasional. Pertemuan iti juga membaas skema bantuan senal yang tepat semberga BBM.

DPR "Judi sekali lagi keputusan ti-dak pada forum konsilasi ini, tapi pada undeng-undang yang berlaku." Masing-masing panol koalisi juga tidak memiliki sikap mpama lepta-dap pertermina, kur Sejan Partai Pre-satuan Pombangunan (PPP), Romaini tak menegantikan pembahasan di

hurmuzly, menegaskan pertermun

residen medegaskan pertemuan

dak mengambil keputusan ten-tang kebijakan harga BBM Menu-rat dia, Presiden ketua umum parpol, sememinta Presiden pendapat

dangkan pengambilan ke-putuan dikembalikan ke-me-kanisme tata negara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal keberatan dengan kenaikan harga BBM juga keming-

kinan marih berkeras dengan penda-patnya. Karera itu, pembahasan ke-naikan harga HBM di-DPH tak-di, jamin muha: "Ini bukan forum penglamin koputusan." kata Presiden PKS Luthii Hasan lahaga.

Sausai pajeritiih empat jan di Cikeas, Ketda Umum Partai Golkar

parnot koalisi

terhadap perteriga tidaicinemimuan itu.

kan empati bagi rak-rat. Ical menegaskan opsi kenaikan harga BBM harus memikir-Aburizal Bakrie me-Po-

BBM, tapi jangan menjadikan rakyat sebagai keritan Kubu Parlai Demokrat meng-

mokrat Syarief Hasan mengatakan, PKS yang selama ini menolak kebi-jakan itu sudah memahaminya. "PKS bisa, mengeri, keadaan ini bahwa ekonomi harus diselamatkan," kata klaim seluruh parpol koaiisi mema-hami rencans kenaikan harga BBM Anggota Dewan Pembina Partoi De-Syarief, Kamis (15/3).

mad, m Wadding unique Masing-masing

Market Bally Live

merintah menuikkun harga yat ical menegas Golkar mendukung



Sita BBM anggota kepolisian berpakalan preman menyita jeriken berisi BBM sebanyak 3,8 ton yang dilimbun warga di daerah Ala Balam, Pasaman Barat, Sumbar, Kamis (15/3)

BBM Disiapkan Skenario *Voting* Bahas

Erdy Nasrul, Mansyur Faqin

harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kamis Hambang Yudhoyono bertemu cana pemerintah menaikkan sultasi untuk membahas ren-DPR melakukan rapat konsung setelah Presiden Susilo (15/3). Pertemuan itu beriungimpinan parpol koalisi di JAKARTA -

untuk mencari titik temu atas kebijakan kenaikan harga HBM Kebi_rakan pemerintah pimpinan DPR ini bertujuan Cikeas sehari sebelumnya. Pertenuan

terburuk jika semua fraksi tak menoapai titik temu. "Ji-ka tidak ada titik temu, akan berakhir poring." ujar Wakil Kaphis (15/3). Ketua DPR Pramono Anung, DPR menyiapkan skenario Meski begitu, pimpinan

menjadi penting mengingat pembahasan APBNP 2012 daan pandangan fraksi-fraktargetnya selesai pada 31 Ma-ret 2012. Pekan ini akan tetlihat kesamaan dan perbe-Nusanters III DPR. Rapat itu Rapat konsultasi ini ber-angsung di lantai-3 Gedung rapkan mencapai kesepakat-an terkait kenaikan BBM. itu masih mendapat penolak-an dari beberapa fraksi, termasuk fraksi yang tergabung Sembilan fraksi di DPR dihadalam koalisi pemerintah

menolak," ujar Mardani.

Badan Anggaran DPR dari PKS Tamul Linrung menilal usulan perubahan pada APBN 2012 tangat banyak nya mengenai masalah Re-naikan BBM. Wakil Ketua menghadap Presiden untuk menyampaikan hasil kajian-

si, terutama soal kompensasi

C Parpol koalisi juga belum memliki sikap seragam me-nanggapi kenaikan hanya BBM Anagora Komai VIII DPR dari Fraksi PKS Mardipersiapkan, kita akan tetap infrastruktur untuk menyam-but kenalkan BBM tidak dani Ali Sera menyatakan, atas kenaikan harga BBM. lama transportasi massal dan cellatkan harga BBM Sec lihaknya tetap akan menolak

taan partai.

a systaty ichsav(c1)

eti m ahsan shiddegy buat Presiden harus mengsesi politik tertentu. Pertentangan parpol koalisi mem-Presiden dengan pimpinan parpol koalisi memiliki konmenaikkan harga. akomodasi beberapa perninatief menilai, pertemuan 💍 Pengamat politik Yudi

kan dengan matang dan seperti tidak direncana A Rencana kenaikan harga

sidi, tapi belakangan memilih ujarnya. Itu terbukti dengan lah kesalahan manajemen, ketidaksiapan pemerintah daroket. Permasalahannya adanyak mentah dunia yang me-BBM bukan karena hargu mi opsi membatasi BBM bersub-Awalnya, pemerintah memilih lam menentukan kebijakan



Palembang tiba di Bandara ap beserta barang bukti 80

ra SARA

para calon belum lengkap. ua masih perlu melengkapi ahnya ada yang banyak dan yang sedikit," kata Ketua)DKI Jakarta Juri Ardiantoro a dihubungi, Jumat (23/3).

ingga akhir penutupan, ada pasangan yang mendaftar t menjadi orang nomor satu hia di Ibu Kota. Empat pain mendapat dukungan dari Yaitu, pasangan Hidayat Wahid dan Didik J Rachbini. PKS; Fauzi Bowo dan Nach-Ramli dari Partai Demokat; Widodo dan Basuki Tjahaya ama (Ahok), dari PDIP dan idra; dan pasangan Alex Noer an Nono Sampono dari Gol-ian PPP Dua pasangan lain, ambil jalur independen, yaitu il Basri dan Biem Benyamin asangan Hendardji Supandji Ahmad Riza Patria.

ata Juri, memang berkas yang s dilengkapi para calon bera Ada pasangan yang tinggal ngkapi sedikit data tambahan un, jugahda calon yang harus ngkapi datanya secara signifi-#c17/antara ed: fitriyan zainz

PKS Surati SBY

■ Erdy Nasrul

Tindakan PKS menolak kenaikan harga BBM dinilai mengkhianati koalisi.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikapnya menolak rencana kenatkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pekan ini. Tindakan PKS-ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan ter-

hadap gabungan partai koalisi. Sekjen PKS, Anis Matta, mengatakan, PKS mengirimkan surat tersebut pekan lalu. Mestinya, pekan ini surat sudah sampai ke tangan SBY Menurut Anis Matta, dalam surat, PKS memberi sejumlah opsi kepada pemerintah terkait harga BBM.

Lebih jauh, menurut Anis, PKS jug menyoal kompensasi kenaikan BBM dengan pemberian bantuan tunai. Hal menurut Anis, sama saja dengan tidak menaikkan harga BBM. Kepada Presiden, melalui surat, PKS juga meminta pemerintah mempertimbangkan penghematan anggaran. Disarankan ju-ga pembenahan pengelolaan sumberdaya minyak dan reformasi kebijakan fiskal. PKS, kata Anis, sama sekali tak menyarankan kenaikan harga BBM dalam surat tersebut.

"Soal masukan PKS diterima atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kami sudah nyatakan sikap," ujar Anis PKS bersikukuh, masih ada jalan selain menaik.:an harga BBM. Di antaranya adalah dengan membedakan harga BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Selain itu, PKS juga tak keberatan dengan kenaikan harga BBM dengan syarat nominal kenaikan hanya Rp 500 saja.

Atas kiriman surat im, pernyataan keras dilontarkan petinggi Partai De-mokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai hal tersebut sebagai bentuk pengkhianatan

PKS tak perlu surat-suratan menolak. Itu salah alamat," jelasnya, kepada Republika, Jumat (23/3). Seharusnya, PKS menghargai koalisi karenamenurut dia, mestinya sebagai partai koalisi PKS selalu berdiri dibelakang pemerintah pemerintah. "Jadi, PKS mengkhianati pemerintah dan semangat Sekretariat Gabungan Partai Koalisi." kata Ramadhan.

Ia menyatakan, PKS seharusnya mempergunakan forum diakusi Sekretariat Gabungan (Setgab) untuk berdialog jika memiliki perbedaan pandangan dengan partai koalisi lainnya. PKS di-persilakan berargumentasi: "Jadi, japersilakan berargumentasi "Jadi, ja-ngan seperti sekarang dong," ujar dia.

Apabila PKS tidak menggunakan forum dialog Setgab dan justru mengirim surat penolakan belakangan kepada presiden maka Ramadhan mengibaratkan PKS sedang main tusuk terhadap pemerintah. Dia mengatakan, PKS hanya memanfaatkan posisi partai ters but di koalisi untuk menduduki kementerian strategis di kabinet "Tapi, tak mau senasib sepenanggungan de ngan pemerintah. Padahal, Pemilu 2014 masih jauh, tapi indikasi benih-benih menelikungnya parah," kata Ramadhan. Menurutnya, sikap PKS ini bisa jadi bumerang karena masyarakat akan menilai PKS sebagai partai yang tak kon-

Terkait penolakan PKS, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua sempat meminta PKS keluar koalisi karena partai itu dinilai telah melanggar kontrak koalisi. Menurut dia, sikap PKS menentang kebijakan kenaikan harga BBM bertujuan mencari popularitas menjelang Pemilu 2014. "Ya sudahlah, kalau begitu PKS tidak usah di koalisi lagi. Sampai kirim surat ke Pak SBY segala berarti di dalam koalisi tidak pernah dianggap. Padahal, ken ada rapat koslisi," ujar Max.

Pernyataan ini disesalkan Ketua DPP PKS, Aboebaker Alhabsy "Jungan-lah mengalihikan isu BBM ini ke persoalan koalisi." kata Aboebakar Alhabsy melalui pesan singkat, Jumat. Menurut dia, apabila saat ini pemerintah menghadapi kekecewaan dari publik maka hal itu tidak perlu dibawa ke urusan koalini. Persoaian kenaikan harga BBM, menurut Aboebakar, adalah kebijakan pemerintah yang tidak bisa serta merta ditarik ke persoalan koalisi Buktinya, kata Aboebakar, menteri PKS di kabinet siap menjalankan kebijakan ini

Ditegaskan Aboebakar yang juga anggota Komisi III DPR Rl itu, dalam hal menolak kenaikan BBM, PKS hanya berniat melaksanakan UU No 22/2011 tentang APBN. "Mazak kita yang mau konsisten dengan UU malah disalahkan seperti ini dan sekarang malah pakai mengusir dari koalisi. Saya yakin yang 'ngomong' ini sedang cari perhatian SBY dengan mencoba mengalihkan isu di metriarriva. . antara ed filtium runo

Surat PKS Dilebihkan

Sebagian anggota parpol koalisi kerap membesar-besarkan masalah.

MEDAN - Surat yang dilayangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal rencana kenaikan BBM mendapat kecaman dari petinggi Partai Demokrat. Tanggapan terhadap surat tersebut dinilai berlebihan.

Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyayangkan sikap partai anggota koalisi yang terlalu membesar-besarkan surat tersebut. Tifatul yang juga menjabat menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, sebagian anggota koalisi sudah mengomentari surat Fraksi PKS tersebut tanpa berupaya mengetahui isinya terlebih du-"Dia belum baca isi suratnya, tetapi sudah dikomentari," ujar Tifatul Sembiring di Medan, Sumatra Utara, Ahad (25/3).

Menurut dia, sebagian anggota koalisi kerap membesar-besarkan masalah, termasuk terkait surat yang disampaikan Fraksi PKS di DPR itu. Ketika dicek lebih jauh, surat yang dikirim Fraksi PKS tersebut hanya berisi sejumlah alternatif atau usulan terhadap rencans kensikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah.

Alternatif yang disampaikan tersebut juga bervariasi, seperti usulan tiadanya kenaikan harga BBM, kenaikan hanya untuk kendaraan pribadi, dan kenaikan secara bertahan "Ada tiga alternatif, tetapi kawan-kawan menimbulkan reaksi yang berlebihan," katanya.

Ia menegaskan, PKS masuk koalisi sejak awal dan bukan partai politik yang datang begitu untuk mendapatkan kursi di kabinet. "Kita ini ikut berjuang, ikut berkeringat," katanya.

Karena itu, sebagai anggota koalisi, sejak awal berjuang memenangkan Presiden Yudhoyono, PKS merasa berhak untuk menyampaikan sejumlah usulan terkait kebijakan pemerin-"Kalau tidak diterima, tidak apa-apa. Namun, jangan keluar kalimat yang tidak bagus seperti 'pengkhianat'. Itu tidak bagus

Sebagai anggota kabinet, Tifatul

menegaskan, pihaknya selalu mendukung kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Malah, sebagai pimpinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. pihaknya berupaya mengoordinasikan kementerian lain dalam menjelaskan rencana kenaikan harga BBM itu "Namun, sering kali yang berkembang di parlemen, 'ditembakkan' ke kabinet," katanya.

Senada, Sekjen PPP M Romahurmuziy menyatakan, jangan menanggapi surat PKS yang dilayangkan kepada SBY secara berlebihan. Ia menilal, surat tersebut hanya manuver politik dari PKS. "Isi surat itu bukan menolak, melainkan sejumlah opsi. Termasuk, opsi menerima kenaikan, jelas Romi. Dia menyatakan, surat itu adalah bagian dari dinamika koalisi.

Jangan bertebihan

Tudingan mengkhianati koalisi yang dialamatkan ke PKS dilontarkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan, pekan lalu. Menurut Ramadhan, cara PKS mengirimkan surat ke Presiden SBY tak Mestinya, PKS sebagai anggota parpol koalisi menyuarakan ketidaksetujuan mereka di forum rapat internal Sekretariat Gabungan (Setgah).

Ramadhan juga mengatakan, PKS seharusnya selalu siap mendukung kebijakan pemerintah sebagai anggota parpol koalisi. Sikap PKS mengirimkan surat, menurut dia, adalah bentuk pencitraan menjelang Pemilu 2014. Jadi, PKS mengkhianati pemerintah dan semangat Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, kata Ramadhan.

PKS mengirimkan surat kepada SBY terkait rencana kenaikan BBM tersebut, pekan lalu. Dalam surat, ditawarkan sejumlah pilihan untuk menghindari kenaikan harga bahan bakar. Saling tak sepaham antarparpol anggota koalisi ini sempat dapat sindiran dari Presiden SBY

Dalam acara pengarahan kader Partai Demokrat di kediamannya, Ahad (18/3), SBY meminta Partai Demokrat menjaga komitmen di koalisi. "Jangan kaitkan dengan kepentingan sendiri, termasuk selalu ingkar dengan kesepakatan. Bukan begitu koalisi yang sejati." • untara ed fitriyan zarirami

Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika

Mansyur Faqih

JAKARTA — Partzi politik diminta mengedepankan etika politik terkait kontroversi kenaikan harga BBM Yang tampak saat ini, kata pengamat komunikasi politik Bachtiar Aly, kondisi politik begitu tak sehat ketika ada sikap partai yang embiyalen

Partai yang tadinya dianggap sebagai bagian dari pemerintah, papar Bachtiar, kini seolah menjadi bagian dari permasalahan pemerintah. Menurutnya, ada kesan Golkar dan PKS buang badan dan ingin menyandera Presiden SBY terkait kebijakan kenaikan harga BBM.

Selama ini, lanjut Bachtiar, pernyataan-pernyataan para petinggi partai Golkar dan PKS sering double bladed. "Tindakan ini gagal mencerahkan dan mencerdaskan bangasa," tegasnya, Jumat (30/3).

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi berpendapat, apa yang ditampilkan partai koalisi sebagai politik muka dua Yaitu di hadapan publik menyatakan sikap menolak kenaikan BBM, tapi di sisi laiu, membuka peluang bagi pemerintah untuk me-

naikkan harga BBM di masa yang akan datang.

"Ini perdebatan bukan naik atau tidak naik. Tapi, seberapa besar persentase dalam pasal 7 ayat 6A yang ditawarkan dan kapan kenalikan itu mulai diberlakukan," katanya kemarin.

Ada dua sikap besar yang muncul dalam pembahasan BBM. Satil sikap menolak pencabutan Pasal 7 Ayat 6 UU APBN Perubahan 2012 dan menilai tak perlu ada penambahan pasal yang membuka ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sikap ini didukung oleh tiga fraksi yang merupakan partai oposisi pemerintah yaitu, PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra

Sikap lainnya menilai perlu adanya tambahan ayat yang tecermin dalam pasal 7 asyat 6A. Ini mengakonodasi usulan pemerintah untuk membuka ruang naiknya harga BBM bersubsidi sesuai dengan fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP). Artinya, kata Burhanuddin. kenaikan itu hanya ditunda.

Opsi ini didukung penuh oleh enam partai koalisi yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab). Meskipun, sebagian partai koalisi menyatakan secara terbuka kenaikan harga BBM, Sikap ini, antara lain, diperlihatkan oleh PKS, Golkar, dan PPP yang secara jelas meminta penundaan kenaikan.

Pasal 7 ayat 6A usulan pemerintah berbunyi, dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari lima petsen dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Perdebatan di partai koalisi pun hanya sebatas masa waktu penyesuaian dan besaran persentase. Fraksi Demokrat sepakat besaran lima persen yang diusulkan pemerintah. Fraksi Golkar dan PAN mengusulkan 15 persen, PKS 20 persen, PKB 17,5 persen, dan PPP 10 persen.

Kubu PKS menegaskah, kenaikan harga BBM terjadi bukan karena faktor eksternal, namun sebab terpenting faktor internal berupa kelemahan perencanaan dan penyusunan APBN 2012. Ketua Kelompok Komisi IV FPKS DPR Rofi Munawar mengingatkan, jika memang kenaikan BBM ini diperuntukkan bagi rakyat miskin, mengapa penolakan justru datang dari mereka.

Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi



- Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq
- Erdy Nasrul, Fernan Rahadi

JAKARTA — Masa depan hubungan Partai Keadilan Sejahte a (PKS) dengan partai koalisi pendukung pemerintah terlihat buram. Kader Partai Demokrat meminta kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menghukum PKS yang menolak mendukung kenaikan harga BBM di rapat paripurna DPK pekan lalu. Sedangkan PKS mengaku siap bila didepak dari koalisi dan menteri-menternya diganti.

Pada Ahad (1/4) siang, Partai Demokrat mengadakan pertemuan tingkat tinggi antara SBY dan pengurus pusat. Dalam pertemuan itu, kata Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum, sempat

Bersambung ke hlm 11 kol 4-6

Birty Boleman/AS

dibahas soal sikap PKS yang kerap berseberangan dengan pemerintah Anas meski tak menyebutkan nama PKS, menyatakan ada partai anggota koalisi yang tidak sejalan dengan kontrak politik koalisi. Terhadap hal ini. kata Anas, SBY, selaku ketua-Koalisi Sekretariat Gabungan, belum bisa memutus sepiuntuk menjatuhkan anksi kepada PKS. Karena iontrak koalisi ditandalingani oleh partai lain ju-Golkar, PAN, PPP, dan KB— untuk mengambil eputusan harus melibatkan gua umum partai lainnya.

Butir-butir kontrak koalgyang sudah ditandatannal oleh koalisi, kata Anas, giu dipahami dan dihayati grama Kalau ada dinatak politik yang menegastah pihak itu bertentangan, giu dikembalikan ke sism "(Kalau ada sanksi bagi KS) ini (harus) keputusan grama peserta koalisi," ka-

Ia menambahkan, meski ki dibahas secara spesifik ad PKS dan manuvernya, da aspirasi kuat kader Debokrat untuk menjatuhkan akuman. Ini karena PKS diandang tak konsisten dan ak komitmen dengan konak komitmen dengan konak koalier.

Wasekjen PD, Saan Muspas manambahkan bila ada sagota koalisi yang ingin eluar silakan keluar Menuut dia, bisa saja ada anggota artai koalisi yang sudah tak yaman lagi karena turunnya sektabilitas dan popularitas erta tak nyaman bekerja sama "Ini penting agar sikap parpolnya jelas. Apakah mendukung pemeriatah atau oposisi pemeriatah," kata dia

Politikus PD lainnya, Ramadhan Pohan, menilai apa yang PKS lakukan pekan lalu sebagai pembangkangan. Karena itu, seluruh kader PD kecewa pada PKS. Ramadihan menyarankan agar PKS keluar saja dari koalisi karena tak mendukung pemerintah.

Juru Bicara Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan masalah PKS kefuar dari koalisi atau tidak, diputuskan oleh Majelis Syuro. Sejauh ini, ia mengakui opsi keluar dari koalisi SBY-Boediono dirundingkan oleh Majelis Syuro.

PKS, kata Ali, konsisten menolak kenaikan harga BBM gijak awal karena hai ini merugikan rakyat. Sikap ini dini tugikan rakyat. Sikap ini dini tainva sebagai dinamika politik yang jauh mementingkan rakyat. Jadi, untuk hal ini, kilahyat, bukan lagi mesalah koalisi atau oposisi.

(Ketua DPP PKS, Abog-

Ketua DPP PKS, Abeebakar Alhabsyi, menyatakan partailiya tak terpengaruh bila didepak dari pemerintahan Sikap partai ini, paparnya, telah disampaikan presiden PKS saat pembukaan Mukernas PKS di Medan.

Ditambahkannya, PKS pernah mengalami situasi dalam pemerintahan ataupun di luar. "Kader kita menempati posisi menteri itu dalam rangka menjalankan tugas partai dan kapan pun pasti siap balik kanan bila diperintahkan partai, ujar Aboebakar. Di Kabinet Indonesia
Bersatu iliid II, PKS menempatkan tiga kadernya sebagai
menteri, yakni Menkominfo.
Tifatul Sembiring, Mentan
Tifatul Sembiring, Mentan
Suswono, dan Mensos Salim
Segai Aljufri, Soal ancaman
efite-eliid PD agar PKS dikeluarkan dari koalisi, menurut
Aboebakar, hal itu tidak
menjadi masalah

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wi-Paya, menilai PD tak usah membuang-buang waktu untuk mengemis agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Sebaiknya, Demokrat lebih memfokuskan diri pada persoalan internalnya yang saat ini jauh lebih penting.

Yunarto berpendapat, mengeluarkan PKS akan membuat gencangan politik pada koalisi dalam jangka pendek.
"Jika PKS dikeluarkan, pemerintah harus mengatur ulang komposisi kabinet yang tentunya akan berdampak pada kinerja pemerintahan," katanya menegaskan.

Dalam jangka panjang, mengeluarkan PKS dari koalisi tidak akan berdampak buruk, mengingat yang dikeluarkan adalah partai yang selama ini sikapnya sering berseberangan dengan sikap pemerintah Lagi pula, Yunarto melanjutkan, tanpa PKS, secara kuantitatif pemerintah masih memiliki 65 persen kekuatan di parlemen.

PKS sendiri, saran Yunarto, tak perlu menunggu SBY mengambil sikap mengeluarkan mereka Daripada menghabiskan energi untuk bermain dua kaki, seperti yang dilakukan PKS selama ini, lebih baik berkiprah di luar koalisi.

#17/antara ed: stevy maradona

Namun celakanya, hargaarga kebutuhan pokok sudah aik tertebih dahutu menganapasi kenaikan harga BBM, breka yang miskin akan seakin tertekan dengan kenaikt harga ini, sementara banan tunai tidak jadi dijaksana-

Dengan postur anggaran ag lemah ini, jika terjadi kejuas besar ekonomi, akan sangat at untuk menghadapinya. Kaea jika krisis melanda perjunomian Indonesia, tidak lagi dapat ruang fiskal yang meatai untuk menanggulangiakarena, menurut UU, defisit ak boleh melampaui 3 persen pi PDB. Tentu saja, persyaan ini dapat diubah, tetapi untuk mengubah UU proses politiknya panjang.

Pilihan bagi pemerintah adalah kembali pada rencana semula untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Pelaksanaannya secara regional dan bertahap akan sangat sulit mengawasinya, Pilihannya bisa saja harga BBM untuk mobil tidak lagi disubsidi. Hanya kendaraan umum dan sepeda motor yang mempunyai akses pada BBM bersubsidi. Cara ini lebih mudah untuk diawasi.

Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sangat sulit pelaksanaannya dibandingkan dengan meningkatkan harga. Pengawasan untuk tidak disalahgunakan sulit dilakukan di lapangan. Karena itu, klasifikasinya harus sejelas mungkin dan sulit untuk dipertukarkan. Dalam hal ini, pemisahan mobil dengan sepeda motor dan kendaraan umum sangat jelas.

Tentu saja, upaya untuk konversi BBM dengan gas juga harus terus dilakukan. Demi-kian pula upaya untuk mening-katkan produksi migas harus dilakukan dengan memperbalki lingkungan investasi. Ironis pada saat harga minyak naik, produksinya mengalami penurunan. Tampaknya permasalahan subsidi BBM ini masih akan tetap di permukaan sepanjang 2012 ini, sementara kermampuan pemerintah untuk mengatasinya lemah. ■

Erdy Nastrul, Mansyur Faqih

dikeluarkan dari koalisi. Kader Demokrat ingin PKS

dak sejalan dengan anggota konlini lainnya dalam penerituan kenaikan hanga RIM berbumut panjang. Pur-lai Demokrat sebagai jumpiana koa-isi membawa inu math akhir PKS dhoyono (SBY) di Cikens, Ahad (1/0) dalam agenda pertemuan tingkat tinggi pengurus DPP dengan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yu-JAKARTA - Sikap PKS yang ti-

dulu berhicara dengan para ketua umum partai anggeta koalisi. Kisruh di unbuh koalisi pemerindiberikan kepada PKS. Dengun alasan kontrak koalisi ikut ditandatangani partai lain—Golkar, PAN, PPP, dan SBY mash belun bisa menutus-kan secara sepihak sanksi yang akan ²KS—SBY memutuakan untuk lebih

mano Anuig mengatakan, penentuan nasib PKS kepenuhnya berada di ta-ngan presidin tan-bakan togan tengan pembicaraan di tingkat Sokretariat Gabungan (Setgab), "Sistem kita kon presidensial, artinya kewenangan se-penakhiya ada pada presiden," kata rusunon anang di gedung DPR, Jatah membuat PDL Perjuangan turus, berkomentar Wakil-Refua DPR Pra-

Arta, Seint (2/4).

Menuruk Pramono, Sergab lahir ketulah pentidan menghasil-kun terpilihnya SBY, Karena itu, bila SBY merrasa sangsi cecok dan bilan kecerja atau dengan TSS, Implukan kecerja atau dengan TSS, Implukan kecerja mang dengan tengan talah tyaman, yah bisa ambil imdakan hujuman, kajasaya.

Wakti Sekretaria Jendeni DPP TSS Mahdula

PKS Mahfudz Siddiq memberi lampu bijau kepada SBY untuk menyikiSpi

PECAH KONGSI?

dari koalisi. Akankah koalisi kini pecah kongsi? dalam sidang panjurna penentuan kenaikan harga BBM seakan sebuah prokia buta. Bahkan, PKS sudah siap dengan segala konsekuensinya, yaitu dikeluarkan masi betapa koalisi bukan jaminan dukungan politik diberikan secara membabi bahkan ikut sejalan dengan pandangan oposisi? Apa yang dipertontonkan PKS apa jadinya kalau para anggota koalisi justru sering berlawanan sikap dan tahan, koalisi berarti satu gerbong dan langkah politik yang padu untuk menjalankan kebijakan dan program-program pembangunan pemerintah. Namun kesepahaman dan tindakan yang disepakati bersama. Dalam konteks pemerin Koalisi mengandung arti sebuah ikatan kebersamaan untuk menjalankan satu

PERBEDAAN SIKAP ANGGOTA KOALISI

Take Car	Ne series	The state of the s		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Hak Angket Malia Daiat
Section 1	One: A	Doci	Opsi C	OpsiA	rentury

Catatan: Terkait kenaikan harga BBM, persetujuan anggota koalisi disertai persyaratan kondisional dengan menambah ayat 6 a dalam Pasat 7 UU



luar koalisi bukan harmantuna nada "PKS di dalam atau di



minta, tapi SBY yang "PKS itu bukan me-



keluar (untuk koalisi) "Harus ada jalan



PKS (masih) masuk koalisi tapi tidak menmempertanyakan kok **Kader Demokrat**



milior diservati Da'an Yahya/Republina

Wasil Ketua DPR Pramona Anung "PKS di dalam atau di luar koalisi bukan bergantung pada Setgab, tapi Presiden."

Makil Benjakana Syrtai Ookasi babang Pisa dari malisi han ne-mendigak Agadhan paliki Kop-mendigak Agadhan paliki Kop-mendisan paliki Bangalan paliki Kop-mendisan paliki Bangalan Perusaina Adari dengan melamanan Kamen ili. Matahan geraman Jiji Lingqii ili. Matahan geraman Jiji Lingqii ili. Matahan dangan dengan Simpah bon-tumbangan dengan termanan malisi Fisik ban delgang timuntunan malih Fisik

"PKS itu bukan me-minta, tapi 5BY yang meminta kita berkoalisi."

Anggota Korrini III OPR FPKS Indra

Ketus Umum Partal Golkar Aburtust Bakele

paripurna kemarin." "Harus ada jalan keluar (untuk koalisi) setelah sidang

mempertanyakan kok PKS (masih) masuk koalisi tapi tidak mendukung kebijakan pemerintah." "Kader Demokrat

Washi Rejus Fraksi PD OPR -

And PCS minipakan bentuh pengawan nanth Tahan Sendanini pengatuhan bentuh pengawan nanth Tahan Sendanini pengabahan bentuh pengabahan bentuh pengabahan bentuh pengabahan bentuh pengabahan bentuh pengabahan bentuh sendan mengahan pengabahan bentuh selaman bentuh sendan pengabahan bentuh sendan bentuh



Aturan Siaran ATVSI Tolak

PAN Setuju Sistem Tertutup

Managur Fasth

JAKARTA — Pertak Jenesek Neiseesa (PAN) suatah menyekupai mentak jenese pertak untuk dakan perdaksakan seletifu pertak jenese dakan perdaksakan seletifu pertak jenese di meng PSL berjambilan pertak pang PAN melah di meng PSL berjambilan pertak pertak dapat senesipangan seletifu serimi serimi pengalah dan mengangan seletifum seletifum dapat dan mengangan pertaktuan salam berdakat dapat mengan mengan pertaktuan salam berdakat dapat mengan mengan pertaktuan salam berdakat dapat mengan mengan pertaktuan salam berdakat mengan mengan pertaktuan salam berdakat mengan mengan pertaktuan salam berdakat mengan pertaktuan

SBY Enggan Bicarakan PKS

Erdy Nasrul, Esthi Maharani

JAKARTA — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih belum mau membicarakan masalah PKS, terkait koali-

si pemerintahan. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan, sejumlah poli-tikus Demokrat sudah menyampaikan aspirasi kader kepada SBY agar PKS dikeluar-kan dari koalisi. Alasannya, PKS sudah jelas-jelas mengabaikan komitmen koalisi dengan tidak berada dalam satu barisan saat Paripurna pengesahan UU APBN Perubahan 2012.

Tak saja belum mau membicarakan nasib PKS, Saan melanjutkan, SBY bahkan tidak memberikan sinyal tegas untuk mengundang reaksi para kader ataupun partai mitra koalisi

lainnya.

"Sampai hari ini, tidak ada pembicaraan SBY yang akan mengeluarkan PKS, karena dinamika Politik biasa saja dan Demokrat selalu menjalin persahabat-an," kata Saan Mustofa di ge-dung DPR Jakarta, Selasa (3/4).

Dia melanjutkan, keberadaan PKS di Sekretariat Gabungan Koalisi sepenuhnya wewenang SBY selaku presiden dan ketua Setgab Koalisi Karena itu, selama tidak memberikan perintah atau pandangan tentang posisi PKS, SBY masih berpandangan kalau koalisi tetap kompak "Meskipun harus diakui, saat ini banyak cobaan yang menimpa parpol koalisi," katanya.

Berbeda dengan Saan, Anggota Dewan Kehormatan Demokrat Jero Wacik mengatakan. kendati SBY mempunyai wewenang penuh memutuskan posisi PKS, namun SBY pasti akan mendengarkan pandangan partai anggota koalisi lainnya.

"Ini kan koalisi enam partai sehingga tidak baik kalau me-sehingga tidak baik kalau memutuskannya sendiri. Harus berenam Nanti melihat bagaimana, maunya bagaimana," ujar

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa enggan mengomentari tentang PKS apalagi terkait detang FRS aparagi terkait de-ngan nisib partai tersebut. "Sa-ya tidak usahlah ngomong-ngo-mong yang begitu," katanya. Hatta menegaskan, pertemuan Setgab di Cikeas, Selasa (3/4) malam akan lebih mengutama. malam, akan lebih mengutamakan pembahasan mengenai upaya menyukseskan program pemerintah

Senada dengan Hatta, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga tak ingin campur tangan dengan urusan PKS dalam koalisi setgab. Priyo ber-alasan, keberadaan PKS di koalisi sepenuhnya menjadi yu-

risdiksi Presiden SBY "Kami Partai Golkar tidak mau ikut campur," katanya.

Sementara itu, PKS sekali lagi menyatakan kesiapannya untuk hengkang dari koalisi Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim menyatakan, PKS lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan ke-pentingan berada di dalam atau di luar koalisi pemerintahan

marisyur tagih edi ah ism



Rakor Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri), Ketua Dewan Pertimbangan PG Akbar Tanjung (tengah), dan Sekjen PG Idrus Marham bersiap mengikuti rapat koordinasi Dewan Pertimbangan se-Indonesia di Jakarta, Selasa (4/3). Rapat ini sebagai langkah koordinasi untuk pemenangan Pemilu 2014.

Bersambung ke hlm 11 kol 4-6

Sanksi *Reshuffle* Ancam PKS

Mansyur Faqih, Esthi Maharani

JAKARTA — Setelah terdepak dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga harus bersiap terlempar dari kabinet, Seluruh partai koalisi sepakat untuk memberikan sanksi bagi PKS yang sikapnya bertentangan dengan setgab. Sanksi itu bisa berupa reshufila terhadap menteri-menteri PKS.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengatakan, PKS telah melanggar code of conduct koalisi, bahkan sudah terjadi empat kali. Karena itu, PKS harus mendapat sanksi. Partaipartai koalisi menyerah bentuk

sanksi itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bima menegaskan, pertemuan setgab pada Selasa (3/4) malam di kediaman Presiden tak membahas sanksi reshuffle bagi PKS, tapi dia yakin akan ada pemberian sanksi beberapa hari ke depan. "Rasanya akan ada langkah signifikan dalam waktu dekat ini. Kita tunggu saja waktunya," ujar Bima.

Pihak Istana memberi sinyal bahwa bentuk sanksi
bagi PKS itu berupa penarikan dari kabinet. Juru Bicara
Kepresidenan Julian Aldrin
Pasha mengatakan, Presiden
segera memberi pernyataan
resmi terkait ada atau tidaknya perubahan dalam susunan
menteri di Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) II

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa juga menyiratkan akan adanya reshuffle terhadap menteri PKS. "Ini saatnya bagi Presiden SBY memimpin koalisi yang walau sedikit lebih ramping, namun lebih mampu mengawal kebijakan pemerintahan SBY-Boediono," katanya. Perjalanan pemerintahan selama dua tahun terakhir cenderung merepotkan.

Daniel menambahkan, sekarang ini saat yang krusial bagi Presiden untuk memastikan hadirnya koalisi yang efektif di parlemen dan di kabinet. Presiden, kata Daniel, berpandangan bahwa koalisi yang rapuh hanya akan menimbulkan masalah bagi jalannya pemerintahan.

Menteri yang berasal dari PKS di KIB II ada tiga orang, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono. Menterimenteri PKS itu menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden.

Tifatul mengaku tak pernah memiliki sikap bertentangan dengan pemerintah. Dia masih melakukan aktivitas secara normal sebagai menteri. "Jika diminta sosialisasi, ya kami (Menkominfo) sosialisasi dan mengoordinasi sosialisasi," kata Tifatul, kemarin.

Suswono mengatakan, selama masih belum dicopot dari jabatannya, ia akan tetap bekerja keras menjalani posisi menteri. "Saya siap di-reshuffle kapan saja," ujar Suswono, Rabu, (4/4). Suswono menegaskan, dia diperintahkan oleh partai untuk melakukan pekerjaan dengan sebaikbaiknya sebelum ada keputusan apa pun.

Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy memandang isu reshuffle ini akibat ada partai yang mengincar posisi menteri PKS. Dia mengingatkan, akad koalisi itu terjadi antara PKS dan Presiden, bukan dengan setgab. Bahkan, kata Aboel Presiden yang terlebih dahulu melamar PKS

Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq terang-terangan
menyebut partai yang takmenghendaki PKS adalah
Partai Demokrat "Kelihatannya memang kader Demokrat
tidak suka dengan PKS. Banyak kader yang meminta Presiden untuk menendang PKS
keluar dari koalisi," ujar Mahfudz. Menurut dia, PKS siap
lahir batin jika di-reshuffle.

Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman menyatakan, PKS seharusnya tidak usah menunggu sikap Presiden.

Mestinya PKS secara ksatria menyatakan mundur dari koalisi itu lebih baik," ujar Hayono, Rabu (4/4). Kalau memang PKS ingin berkoalisi, ujar Hayono, berkoalisilah dengan sehat.

Partai Golkar enggan disebut memiliki peran mengeluarkan PKS dari koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, pihaknya tak mendesak siapa pun untuk memberikan sanksi kepada PKS: "Kita nggak ngurusin partai lain. Tidak etis," ujarnya di Kantor Presiden, kemarin.

ed: m ikhsan shiddiegy



8 APRIL 2012

16 JUMADIL AWAL 1433 H NOMOR 91/TAHUN KE 20

Rp 3.500 / 24 Heleman IUAR P JAWA Rp 4.500

MAHAKA GROUP

Tiga Opsi untuk PKS

JAKARTA — Pasca-Sidang Paripurna DPR pada Jumat (30/3) lalu tentang pengesahan UU APBN-P 2012, sampai saat ini Presiden Susilo Bambang Yudho-yono (SBY) belum juga menentukan sikapnya terkait keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Presiden SBY dinilai bimbang. "Presiden sBY dinilai bimbang. "Presiden jungan lagi menyampaikan sikapnya lewat sinval-sinyal," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, dalam sebuah diskusi Si. Jakarta, Sabiu (7/4). Namum-hali tu dibantah Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat, Ruhut Sitompul Menurutnya, Presiden tak pernah bimbang memutuskan sesuatu, termasuk nasib PKS di Setgab. Ia menampik adanya partai tertentu yang akan melakukan pengumuman tersebut. "Bukan Golkar atau partai mana pun, tapi juru bicara Setgab, kata dia saat dihubungi Republika, kemarin.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yogyakarta Ari Dwipayana, ada

mana pun, tapa jaman mana punbilka, kemarin:

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ari Dwipayana, ada diga opsi yang bisa diambil Presiden SBY untuk menyelesaikan status keanggotaan PKS di Setgab. Pertama, memberhentikan tiga menteri yang berasal dari PKS. Kedua, mengeluarkan satu menteri asal PKS dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Dan ketiga, tetap di Setgab, tetapi artikulas politiknya tidak terakomodasi secara optimal. "Untuk pilihan yang terakhir, misalnya, tidak ada bendera PKS di Setgab," ujar Ari.

Kendati demikian tutur Ari, bila Presiden harus mendepak PKS dari Setgab, Partai Demokrat harus bersiap untuk menanggung segala risiko politiknya Risiko politik itu bisa berupa politik melodramatik atau parlemen. Politik melodramatik atau parlemen. Politik melodramatik atau parlemen. Politik melodramatik atau parlemen. Politik itu bisa berupa politik secara politik lantaran dikeluarkan dari Setgab karena menolak kenaikan harga BBM. Dampaknya. PKS akan memperoleh banyak dukungan masyarakat.

Sedangkan politik parlemen, lanjutnya, selepas PKS dikeluarkan, tidak ada jaminan parpol lain tidak bermanuver. Ari mencontohkan Partai Golkar. Bila Golkar juga keluar, kata dia, Partai Demokrat akan kehilangan banyak suara di parlemen.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq berharap. PKS tetap diakomodasi dalam keanggotuan Setgab. • 100/41 et manada dia parlemen.

Refleksi

Panggung



mainpu qengembalikan popularitas denga- Ala nushurunkan harga BBM menjelang pemiliu. Kebetulan waktu itu angin sedang berpihak ke pemerintah di mana barga minyak dunia turun drastis dari 140 dolar AS menjadi hanya 40 dolar per barel. Sekarang-angin sedang berbalik. Akibat potensi konflik di Selat Hormuz, harga minyak dunia meningkat sampai pernah menyentuh 125 dolar per barel. Pertanyaannya, apakah BBM kini menjadi musuh SBY? Bisa ya, bisa juga tidak.

Bersamburg ke him 11 kol 4-6

Menteri PKS Berkurang Satu

Mansyur Faqih

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus rela melepas satu menterinya dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Rencana pengurangan kursi menteri itu merupakan sanksi bagi PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sikap yang bertentangan dengan Sekretamat Gabungan (Setgab) partai koalisi dalam sidang partai pengurangan Jetahan Bhatocgang pengurangan Jetahan Bhatocgang pengurangan Jetahan sanksi jika PKS mempakan sanksi jika PKS masih tetap dalam koalisi. Apabila PKS memutuskan untuk keluar dari koalisi, seluruh menteri asal PKS juga harus keluar dari kabinet "Kalau mereka masih di dalam, hilang satu (menteri)." kata Sutan, Ahad (8/4)

The same of the sa

Bersambung ke him 11 kel 1-6

Dia belum mengetahui satu nama menteri PKS yang
akan ditarik dari kabinet
Keputusan soal itu, ujar Sutan, ada pada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Saat
ini, ada tiga menteri asal
PKS, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial
Salim Segaf Aljufri, dan
Menteri Pertanian Suswono

Sutan menambahkan pi bisa saja PKS menyatakan oi kehar dari koalisi, tetapi tiga medterinya tetap dipertahankan. Hanya saja, kader terse-

but harus menyatakan keluar dari partat, seperti pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Jika masih berada di partat, menteri itu sulit membela dan menjalankan prugram pemerintahan.

menteri PKS itu juga berkaca pada reshufile kabinet akhir itu ti tahun lalu. Ketika itu, menteri PKS dikurangi dari empat menjadi tiga "Dulu enge pat menjadi tiga "Dulu enge pat menjadi tiga "Dulu enge pat menjadi sahun PKS, tapi keluar juga satu barang, PKS keluar juga satu barang, PKS emi waki juga ancam keluar dari Setdan

gab, tapi tidak keluar juga Menurut Sutan, sanksi ukan memberikan garis batas

ukan memberikan garis batas ke jelas sekaligus etika dan pembelajaran politik bagi anggota Setgah. Dia menegaskan, Demokrat dalam posisi dan pasif terkait wacana penggantian posisi menteri PKS itu. Semua anggota koalisi, kata dia, menghormati hak prerogatif Presiden.

Sutan memastikan, sanksi dan tu tidak akan diberikan sebelum Presiden bertemu kon hangsung dengan PKS. Dia jak enggan menyebut kapan pertemuan itu dihelat. "Dalam tetawaktu dekat akan dipanggil mereks. Pesan yang saya baca yar dan harus dipahami kita seper

mua, SBY melihat kalau urusan negara itu lebih utama ketimbang urusan Setgab."

Menteri Söster sekaltgus politikus PKS Salim Segal Alufri menyatakan, siap dikebaakan dari koalisi-PKS selalu siap atas segala kemungkinan, termasuk jika dikeluarkan dari koalisi pemerintahan SBY," ujar Salim.

Menurut Salim, keluar dari koalisi ditempuh jika pemerintah tidak memedulikan kondisi rakyat dalam kebi-jakan-kebijakan yang ditetapkan PKS, kata Salim, tetap membantu pemerintah menciptakan postur APBN yang sehat. Namun, dalam penyelenggaraannya, kepen-

tingan masyarakat kecil harus tetap diutamakan.

Di dalam ataupun di luar koalisi, PKS akan terus memperjuangkan kepentingan perjuangkan kepentingan rakyat "Saat ini, tidak perlu banyak omong, buktikan dengan kinerja-yang bagus".

Pengamat politik Univer-

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM)
Arie Sudjito mengatakan, hubungan antaranggota koalisi tidak dibangun secara kuat, tetapi hanya untuk bersaing berebut posisi di hadapan Presiden, Desakan pemberian sanksi dari anggota koalisi kepada PKS merupakan upaya untuk mendapatkan

akses di kementenan. Menurut Arie, Demokrat

ha- ada dalam posisi sulit. Apa pun keputusan yang diambil luar partai penguasa itu akan dinem- anggap paling bertanggung

di luar partai penguasa itu akali urs mem- anggap paling bertanggung
itingan jawab. Jika ternyata keputuskepertu annya mengeluarkan PKS
ketikan dari koalisi, Demokrat akan
agets menambah musuh
pKS pun menjadi dilema

PKS pun menjadi dilema Jika tetap bersikap keras, PKS akan mendapat citra positif di masyarakat untuk membangun citra. Namun, PKS akan kehilangan akses di tiga kementerian yang saat ini dipegangnya. "Kalau Demokrat tidak jeli, Setgab akan semakin keropos. Goyangan Golkar bisa membuat konfigurasi Setgab bubat," katanya. "Ci edimikasan shidden

buat kagum penonton.

Bersambung ke him 11 kol 1-3

PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle

M Akbar, Mansyur Faqih

JAKARTA — Kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikap
pasif mencermati manuver politik di Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Ditanya soal
kemungkinan reshuifle kadernya
dari Kabinet Indonesia Bersatu
jilidili, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq memilih bungkam.
"Soal

Pr

kε

b€

ral

me

pil: an

Ha

(qu sur

san

Abo

koalisi dan Golkar yang menteri sava Untung Kalau tak mau ko-PKS Keluar mentar dulu. Tanya yang Menakar SI lain saja, Partal Biru nanti saya jawab," kata - Hlm 10 Luthfi saat dihubungi Republika, Senin (9/4). Saat ditanya mengenai kemungkinan Menteri Pertanian Suswono bakal digusur dari kursi dan digantikan oleh kader Demokrat, Luthfi kembali mengatakan, "Nanti saja, ada saatnya."

Bersambung ke him 11 kol 1-3

Pilkada Aceh Calon Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memasukkan surat suara di TPS 002 Gampong (Gesa) Lampriet, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, Senin (9/4). Provinsi Aceh kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah gubernur, bupati/wali kota yang ke dua kali pascaperjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005.

PKS Pilih Pasif Soal Reshuffle

darihlm 1

Ditemui terpisah, Sekjen PKS Anis Matta menegaskan, partainya tidak akan mengundur kan diri dari koalisi pemerintah sebelum ada sikap dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anis mengatakan sikap PKS saat ini cenderung pasif. Anis mengklaim tak menyiapkan langkah bilamana partainya ditendang keluar dari koalisi atau kader PKS diganti di kabinet.

"PKS sikapnya jelas. Menunggu Pak SBY," kata Anis di Gedung DPR. Namun, Anis mengakui tak seharusnya SBY mengatung-katungkan masalah politik ini. Menurut Anis, seharusnya kondisi politik PKS ini dibahas sejak lama, tidak lalu tiba-tiba jadi ramai.

Julian A Pasha menegaskan, Presiden SBY tak memiliki keharusan menyampaikan pernyataan, terutama terkait dengan nasib PKS di Setgab. "Untuk PKS, Presiden tidak akan menyampaikan langsung pernyataan. Tidak ada keharusan Presiden menyam-

paikan hal itu," katanya.

Kisruh PKS yang diawali dari penolakan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat sidang paripurna dua pekan lalu ini juga menjadi sarotan partai lain Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa mengatakan tak nyangan terus-menerus mendengar pembahasan soal kemungkinan pergantian menteri PKS. Ia mengatakan pembahasan semacam ini tak konstruktif.

"Saya melihat kita kok terjebak dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak begitu konstruktif, bicaranya menteri diganti sama situ, sama ini," kata Hatta, Senin (9/4). Menurutnya, lebih baik mengutamakan pemerintahan stabil, kuat, dan berjalan baik.

Ia menekankan Pemerintahan SBY harus sukses ketimbang sekadar ganti menteri ini dan menteri itu. Hatta menegaskan tak mau masuk ke dalam wilayah pembicaraan reshuffle karena hal itu hak Presiden. Politikus PDIP Pramono
Anung mengatakan, marakhua isu pemecatan PKS
lebih didorong nafsu politikus yang ingin jadi menteri.
Ia melihat banyak politikus
di sekeliling SBY, baik dari
Partai Demokrat maupun di
luar Demokrat, yang mengincar kursi PKS.

Mantan sekjen PDIP ini lantas melihat kisruh PKS layaknya kisah cinta remaja. "Mau diputusin atau mau diterusin?" kata dia. Ia berharap masalah politik ini segera ada jalah keluarnya dan cepat selesai.

Pengamat politik Yudi Latief mengatakan, Presiden SBY saat ini sedang galauterkan dengan PKS. Kegalauan itu karena di satu sisi SBY harus memberikan sanksi tegas kepada PKS karena sikapnya yang bertentangan dengan rencana pemerintah. Tapi di sisi lain, kalau PKS keluar ini akan menambah oposisi.

Awalnya, ujar Yudi, SBY berharap anggota koalisi akan sepakat meminta pemecatan PKS. Namun, ternyata anggota koalisi menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah.

■ ed: stevy maradona

SBY Takut KS Besa

A Syalaby Ichsan, Esthi Maharani

PKS tolak cabut menteri karena merasa punya "saham".

JAKARTA — Sejak rapat partai politik di Sekretariat Gabungan (Setgab) yang memvonis PKS melanggar kesepakatan koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak kunjung mengumumkan sikap terkait status PKS dalam koalisi. Hal ini dinilai karena ada ketakutan PKS justru mendapat banyak dukungan jika didepak.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan ada kekhawatiran kalau PKS akan meraih simpati publik jika dikeluarkan dari koalisi. Demikian juga seandainya SBY memberhentikan menteri dari PKS. "Persoalannya serius. Dia (Presiden) tahu kalau PKS ditendang malah akan membesarkan PKS," ujar Burhanudin saat menjadi pembicara dalam bedah buku bertajuk "Dilema PKS, Syariah, atau Suara" di kampus 2 Universitas Islam Negeri Jakarta, Selasa (10/4).

Burhanudin menjelaskan, simpati warga bahwa PKS merupakan partai terzalimi akibat menolak kenaikan harga BBM akan menguntungkan PKS dalam kompetisi Pemilu 2014. Kegundahan SBY, ujarnya, semakin menjadi karena di dalam barisan koalisi cuma Partai Golkar yang merupakan partai besar. "Golkar pun bukan good boy. Banyak pembangkangan yang dila-

kukan," tegasnya.

Terkait dengan sikap PKS yang selalu kritis dalam koalisi, Burhanudin menjelaskan, PKS akan tetap mendapat dukungan dari konstituennya. Kalau manut-manut saja di koalisi malah makin banyak yang lari," tegasnya.

Punya saham

Di pihak lain, mantan presiden

PKS Tifatul Sembiring mempunyai pendapat sendiri soal mengapa PKS masih di koalisi dan berhak mendudukkan menterinya di kabinet Menurut dia, "sekam" PKS dalam pemilu presiden lalu turut menjadi pertimbangan.

"Kita menggerakkan mesin kita untuk bertempur di bawah. Kita berkeringat. Kita berbeda dengan partai lain," ungkap Tifatul dalam acara yang sama. Menurutnya, PKS dari awal sudah mengusung SBY sebagai presiden dalam Pemilu 2009. Hal tersebut, ujarnya, berbeda dengan partai politik lain yang baru datang belakangan.

Oleh karena itu, ungkap Tifatul, PKS masih merasa berada di dalam barisan koalisi dan mempertahankan menterinya dalam kabinet. Dia pun menegaskan, partainya tidak bisa serta-merta menarik menteri-menterinya karena masalah perbedaan pendapat di parlemen mengenai BBM

Meski demikian, Tifatul mengungkapkan akan menerima apa pun sikap yang bakal dinyatakan Presiden SBY termasuk jika dia dipecat sebagai menteri. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin oleh konstitusi. "Kalau begitu putusan presiden, kita siap karena itu hak prerogatif Presiden." ujarnya Dalam kunjungannya ke Solo.

Presiden SBY sempat bertemu dengan Presiden PKS Luthfi Hasan dan Tifatul Sembiring, Senin (9/4) malam. Kendati demikian, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Saparingga, belum ada perkembangan sikap SBY berdasarkan pertemuan tersebut.

Menurutnya, isu reshuffle kabinet masih harus melalui pertimbangan matang dari Presiden. "Bagaimanapun, ihwal ini adalah soal yang serius. Tidak akan membantu apa-apa bila kita menyederhanakannya seakan itu adalah keputusan yang kita buat setiap harinya," katanya.

ed: fitriyan zamzı

PKS Mulai Gerah di Setgab

Mansyur Faqih

JAKARTA — Status Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di sekretariat gabungan (Setgab) parpol koalisi dan nasib menteri-menteri dari PKS di kabinet belum menemui kepastian. Pihak PKS merasa ada diskriminasi terhadap mereka di Setgab.

Kenapa ketika PKS berbeda sikap dengan Demokrat semua lantas berkomentar Semua dengan sengaja mengeksploitasi kita. Sepertinya pada ketakutan kalau PKS menjadi partai yang besar. Sehingga kita di-downgrade habis-habisan," ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsy, Selasa (17/4).

Aboe Bakar mengaku, bingung melihat tidak jelasnya posier PKS di Setgab. la menilai, perlakuan terhadap PKS ini berbeda dengan perlakuan terhadap partai koalisi lainnya. Menurut dia, ketika PAN dan Golkar memiliki pandangan berseberangan dengan Demokrat mereka tak diperlakukan seperti PKS saat ini. "Tak ada yang berani mengusir Golkar atau PAN keluar. Sangat kelihatan sekali perlakukan diskriminatif ketika kita berpendapat berbeda dengan Demokrat," ungkap anggota Komisi III DPR tersebut.

Yang terjadi dalam Setgab, kata Aboe, merupakan bentuk oligarki dalam berpolitik. Ia berpendapat, di Setgab, kekuatan besarnya selain Demokrat, dipegang oleh Partai Golkar melalui Aburizal Bakrie, dan PAN melalui Hatta Rajasa. Kedekatan keduanya dengan SBY membuat Golkar dan PAN jarang mendapat tentangan di Setgab.

Namun, Aboe mengatakan, masih optimistis kalau masyarakat akan melihat seluruh persoalan di Setgab ini secara menyeluruh. Ia menilai, masyarakat saat ini sudah cerdas dan pandai

memberikan penilaian-

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan, PKS harus bersikap tegas. Jika memang sudah merasa tak nyaman, sebaiknya keluar saja. "Kalau di situ terus dikira oportunis malah. Cuma memanfaatkan kedudukan, tapi tidak sejalan dengan putusan koalisi. Itu malah mencemarkan nama PKS yang sudah baik. Mencemarkan nama dan identitas partai yang sudah memiliki kredibilitas," kata dia di Jakarta, Selasa (17/4).

Kristiadi mengatakan, PKS merupakan partai yang memiliki prinsip dan karakter sendiri. Bahkan, memiliki konstituen tersendiri. "Dia memperluas konstituen dengan keterbukaannya. Makanya, menurut saya tidak ada soal (keluar koalisi)," tambah dia.

Ia pun melihat, masalah ini tak semata urusan personal. Melainkan mengacu ke konsep bernegara yang diinginkan oleh PKS. "Kalau dia tidak tahan di situ karena tidak jelas agenda koalisi lalu keluar, tidak apa-apa. Malah

lebih mulia," ujarnya.

Selain itu, Kristiadi juga menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus tegas kalau tidak ingin masalah ini mengganggu efektivitas pemerintahan. "Makanya tergantung. Pak SBY mau nekat atau tidak pimpin negara ini. Nekat untuk mengambil risiko," ujar dia.

■ ed: fitriyan zamzami

KS Nilai SBY Takut Golkar

■ Erdy Nasrul

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak pernah mempersoalkan-perbedaan pandangan-PAN dan Partai Golkar dengan Partai Demokrat di koalisi. Hal ini, menurut Ketua DPP PKS Aboe Bakar al-Habsyi, ini mengindikasikan SBY takut dengan Aburizal Bakrie sebagai pimpinan Partai Golkar.

"Tidak ada yang berani mengevaluasi, mengusir, atau bahkan mengutak-atik menteri-menteri dari dua partai tersebut. Apa lantaran pada takut dengan Ical (Aburizal Bakrie, ketua umum DPP Partai Golkar—Red)," kata Aboe Bakar saat dihubungi, pekan ini.

Dia juga merasa heran mendengar pernyataan SBY yang mempersoalkan sikap politik PKS terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM di rapat paripurna lalu.

> SBY menyampaikan pidatonya sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta. Namun, kata Aboe, ketika Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional berbeda pandangan dengan Partai Demokrat, misalnya, dalam isu UU Pemilu, tidak ada satu pun partai-partai di koalisi mempersoalkan hal tersebut.

"Semua diam seribu bahasa."
Aboe Bakar mengingatkan, sistem
politik di Indonesia menggunakan
sistem pemerintahan kabinet presidensial. Jadi, kata dia, urusan pergantian menteri atau perombakan
kabinet di tangan presiden. Petinggi
partai koalisi, menurutnya, tidak
layak mencampuri hak presiden.

Dihubungi secara terpisah pengamat politik Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan, presiden memang tidak beranimempersoalkan atau mengevaluasi sikap Partei Golkar Karena memiliki posisi tawar politik lebih besar ketimbang PKS. "Sejak awal, chem-

istry (hubungan) PKS dengan koalisi lemah," ujarnya.

Menurut Arie, reaksi PKS justru memperlihatkan bahwa mereka sesungguhnya tidak siap dengan risiko politik saat mengambil sikap berbeda dengan koalisi. Jika PKS memang betul memiliki sikap ideologis, kata Arie, tidak perlu merasa iri.

Justru sikap atau ideologi PKS terlihat bimbang dan ragu. Di satu Sisi ingin mengambil sikap berbeda akibat didorong persaingan antarpartai di koalisi, namun di sisi lain berupaya agar kader mereka di kabinet tidak dikeluarkan oleh presiden

"Sikap ideologi PKS masih terbebani oleh kepentingan ekonomi politik. Mereka sadar bahwa tetap berada di kabinet bisa mendapatkan akses atas proyek dan program-program pemerintah, "ujarnya. Karena itu, kata dia, jika benar PKS partai yang ideologis, harus mundur dari koalisi. • et:tiriyan zamzami

PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi

■ Ira Sasmita

PKS pecah menjadi dua kubu terkait rencana kenaikan harga BBM.

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkukuh tidak mendukung pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsi,li. Kebijakan itu dinilai tidak menyentuh persoalan terkait energi.

Sekretaris Fraksi PKS
Abdul Hakim mengatakan,
PKS tetap menolak kenaikan
harga BBM meski pemerintah
menyiapkan kompensasi dan
disetujui partai anggota
Sekretariat Gabungan (Setgab). Penolakan karena pemerintah tak serius menyelesaikan kebijakan energi.

Padahal, pembenahan energi perlu dilakukan agar masalah yang sama tidak berulang setiap tahun. "Ini kebijakan sesaat," ujar dia, Kamis (6/6). Persoalan pengelolaan energi ini membuat pemerintah kebingungan ketika me-

nyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tahun ini, pemerintah ingin menekan delisit di bawan diga persen. Tapi, kata Abdul, tak seharusnya pemerintah membebankan persoalah energi ke masyarakat Menurutnya, kenaikan narga BBM akan sangat merugikan masyarakat.

Apalagi, kebijakan diterapkan bertepatan dengan tahun ajaran baru dan menyelang Ramadhan, saat keska harga kebutuhan pokok cenderung naik. "Hasil survei Lembaga Survei Nasional, 86 persen masyarakat menolak kenaikan BBM," ujar anggota Komisi IV DPR itu.

Langkah PKS ini mendapat dukungan dari kader di
daerah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS
Kabupaten Kulonprogo, DI
Yogyakarta, Hamam Cahyadi, mengatakan, keputusan
Dewan Pimpinan Pusat PKS
ini sesuai aspirasi kader. "Kami menjaring aspirasi dari
dapil dan hasilnya menolak
kenaikan harga BBM," kata
Hamam Cahyadi.

Meski terlihat solid terkait

THE MANUAL AND COUNTY TO THE RESERVE AND ADDRESS AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA

BBM, menurut pakar politik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ahmad Norma, internal PKS pecah menjadi dua kubu terkait rencana kenaikan BBM inf. "Kubu Anis Matta menalak kenaikan harga BBM sedangkan kubu Tifatul Sembiring yang ada di dalam kabinet tentu mendukung kebijakan pemerintah," kata dia

Terkait dua kubu itu, maka posisi Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin memiliki peran sentral. Dia menilai, Hilmi akan berpikir nasib PKS dan itu ditentukan situasi kasus mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Apabila kasus LHI parah sampai terbukti uang Fathanah mengalir ke partai, tentu Hilmi akan kompromi terkait kebijakan BBM itu," ujar dia.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menilai, PKS menjalankan strategi itu guna meningkatkan elektabilitas terkait Pemilu 2014. Dari perspektif koalisi, PKS menjalankan politik dua kaki karena di pemerintahan memiliki menteri.

antara edi ratna puspita Rp 3.500 /32 Halaman UAR FJAWA Rp 4.500 Strambah angkas kerim

republika.co.id FepublikoOnline 🚮

Golkar Coba Bungkam Priyo Bunga KPR akan Naik



Hakim Mesir Tolak Amendemen UU Peradilari

KHAZANAH



Ketidakpastian Jadi Beban



Wapres memimpin rapat rsama ketua fraksi dan perwakilan Setgab.

JAKARTA - Pemerintah perlu segera mengambi, kepuhasan untuk me-naikkan barga bahan bakar minyak (BBM) bersubadi. Harga BBM yang tak kunjung naik akan terus membebani pemerintah dan masyarakat. Ke-

bani pemerintah dan masyarakat Ke-putusan kenaikan harja BRM diperbi-rakan terbit pekan depais.

Menteri Perdagangan Gita Wira-warymeminta harja BBM naik sese-gera hungkin. "Semakin cepat harga BBM bha dinaikkan, semakin kita bisa mengatur seraca perdagangan-kata Gita, Selasa (4/6).

Menteri Energi san Suntan Daya Mensal Jero Wacik mematikan hang BAM naik namun tangdal senaikan belum dipastikan "Ferling saya minggu depan BBM naik, nata Jero in Jinang Rapat Komisi VII DPR, Salasa (4/6) sore Premium pencanastya naik dari Rp 4.500 per inter menpadi Rp 6.500 dan solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500. Tingkat inflau diperkirasan mencapai 7.2 persen.

Wakil Menteri Kewangan Mahen dira Siregar mengatakan hera BBM

wakil Menteri Kesangan Manes-dra Siregar mengatakan, haria HBM harus segera naik dalam wakiti dekat karena pada Juli mendatang terdapat Jahun ajaran haru dan Ramadhan Jahun ajaran haru dan Ramadhan yang bisa membuat danpak kenakaan harga BBM makin memberatkan magyarakat. "Kapan pun diputuskan makan repot" kuta Mahendra.

Pemerintah segera menarkkan harga BBM apahla paket kompensan dalam RAPBNP 2013 disebugai sieh DPR. Masa pembahasan RAPBNP

diperkinakan beriang sung selama satu bulan sejak pemerintah menga-jukannya pada 17 Mej lalu, sehingga RAPBNP iharapkan tuntas pada ti Juni Namun, bukan berarti harga BBM naik pada tanggal itu. BBM naik atau tidak naik itu

BBM naik atau tidak naik itu sudah bukun isu lagi, itu seman sudah bukun isu lagi, itu seman sudah paham, kita harus melakukan itu Yang penting masyarakat kita buetu Kasihan kalau nggok ada itu (sompersusi) kur, kata Menke Perekriseura-Hatta Hajasa Hatta mendak segar ada fraksi yang menolak kenulasi bagar ada fraksi yang menolak kenulasi bagar ada fraksi yang menolak kenulasi bagar ada fraksi dan perwakijan Sekreta-riai Gabungan (Setgah Parjel Krahisi da kediamannya mendukunjan isan

di kediamannya mendiskusisan ten taha kenaikan harga BBM Parta Ke adilan Sejahtera (PKS) menjisak ke

matkan harga BBM.
Wakil Ketua Umum
Parta: Golkar Agung
Laksono mengeluhkan
kekompakan Setgab. Ia
memandang perlu ada
sankai disiplin kepada anggota Setgab yang ti-dak kompak. "Menurut gakan disiplin penting. k tidak ada manfaatnya

hung kalau kayak gini te-

971

VOID

Agung arus Praksi PKS Abdul Ha-benutusan kenangatkan, keputusan kena-RBM itu hak pemerintah, mentunya ada di DPR terkait diahasan RAPBNP Terkait Sung menolak kenaikan BM Abdul mengatakan. Disk and a melinat perkenbangan di Sergiah Dia tak khawatir menteri ana 1783 dicepat dari posisinya

Dalia: Manulita ... 11

Wapres Berharap Koalisi Kompak

世世世世世 日本記書

Esthi Maharani

bungan (Setgab) parpol koalisi membuat Wakil Presiden Boesasinya dalam RAPBNP 2013 stalisast. Langkah itu penting diono perlu melakukan sobisa segera tuntas nyak (BBM) beserta kompennaikan barga bahan bakar miagar proses pembahasan kesikap anggota Sekretariat Ga-JAKARTA - Perbedaan

Langkah Wapres ini sesuai de-ngan posisinya sebagai ketua tim sosialisasi harga BBM. rencana kenaikan harga BBM diamannya, Selasa (4/6) madan para ketua fraksi di kepinan parpol anggota Setgab am. Pertemuan membahas Wapres mengundang pim-

> dan revisi yang dilukukan, kata Juru Bicara Wapres, Yo pie Kidayat, Selasa (4/6). memberikan penjelasan sejean dengan para pemimpin parpol. "Wapres bertugas Wapres gencar memberi-kan penjelasan dan menyamengenai rencana pemerintah merintah, termasuk pertemumakan persepsi tentang kebilas mungkin, secura terperinci akan yang akan diambil pe-

mengatakan persoalan PKS dibahas dalam pertemuan ketua parpol dalam Setgab di-(PKS) menyatakan penolakan yang dipimpin Wapres itu undang, termasuk PKS. Dia BBM. Menurut Yopie, semua terhadap kenaikan harga Partai Keudilan Sejahtera Di afftais anggota Setgab

> Bisa saja, kata Yopie, PKS perlu pendalaman lebih detail persetujuan DPR sebelum nal. Dia beralasan, harus ada Namun, ditegaskan Yopie, mengenai kebijakan tersebut berujung pada keputusan fipertemuan kali ini tidak akan

tuan langsung sementara ma-syarakat)," katanya. merintah untuk menaikan harga BBM yang disertai menerima usulan BLSM (banakan menyetujui rencana pemeyakini semua fraksi di DPR Kalau PKS, saya yakin akan kasihan sama rakyat miskin. program perlindungan sosial. ber Daya Mineral Jero Wacik "Partai mana pun saya rasa

■ ed: m ikhsan shiddlegy

adanya kenaikan harga BBM Menteri Energi dan Sum-

De de te te te

Sin

H Ya

91

Istighatsah dan Rajaban Sambut Isra Mi'raj

dari hlm 1

tradisi ini pihak keraton mem-

5

Rp 3.500 / 44 Malamun LUAR PJANA Rp 4.530 Ditambah singkas Luim

Designation of the second

Electronic City Tawarkan Saham Perdana

Man 14

republika.co.id

EnjaddhaOrdae 🚮

Hlm 24 Korut-Korsel Sepakat Dialog



BBM Naik, Rakyat Tercekik

me days

Ę

rakan menti Kota Pasbanjir menan banjir Kamis (6/6) meteorologi

i.Fauziab

ihat harga-iusiawi. Sagkol sudah igga Kamis ah kini sean kalang tiga ekor

aga jengkol al pekan ini agkut saalah

Indepth

Namun, PKS menolak kenaikan

kenaikan harga BBM. Belakangan,

arga Jengkol va 40 Tahun, tak Nail Him-9

per kg ke nenggila. engatakan

Hakim di Jakarta, Kamis (6/6)

-

)

1gKo ue Mm 9 kol 4-6 a

betsubsidi menjadi pemicu konflik ini cing. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Partai Demokrat (PD) makin merun-Konflik PKS versus

koalisi minus PKS setuju menetapkan harga Premium Rp 6.500 dan solar Rp BBM yang naik tajam. sul membengkaknya defisit APBN pemerintah, harus dilakukan menyu-5.500 per liter. Kennikan int. linta Sekretariat Gabungan (Setgab) partai Perubahan 2013 akibat konsumsi Pemerintah dengan dukungan spanduk tandingan yang mendukung PKS. Di beberapa titik, sempat berdiri ikan harga BBM lengkap dengan logo pemerintah terlihat pada spanduktusan strategis terkait ini kota. Isi spanduk itu menolak kenaspanduk yang dipasang di sejumlah Bentuk perlawanan PKS terhadap

masyarakat, jadi kami perjuangkan untuk dibatalkan kenaikannya," kata Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul PKS. "BBM merupakan kepentingan sampaikan petinggi partai dan Fraksi gota Setgab. Penolakan ini terus diharga BBM ini meski termasuk angyadharma Ali, Muhaimin Iskandar, Setgab, seperti Aburizal Bakrie, Surta, Selasa (4/6) malam. Pada rapat itu, muan Setgab di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Menteng, Jakarhadir ketua umum partai anggota spanduk ini dicopot PKS pun tidak hadir dalam perte-

Syuro PKS, menurut dia, sejak tiga Pusat (DPTP) yang dipimpin Hilmi Aminuddin untuk mengambil kepuserta bentuk kompensasınya. Majelis dipertahankan meskipun Setgab koalisi menyepakati kenaikan harga BBM kepada Dewan Pimpinan Tingkat sekan lalu telah melimpahkan mandat la menegaskan, langkah ini tetap dinaikkan, tapi mereka tidak menyecara-cara yang baik di parlemen Hatta Rajasa, dan Syarief Hasan bukan cara yang elegan dan tidak etis Mustopa berharap PKS menempuh "PDI Perjuangan juga menolak BBM Penyebaran spanduk itu, kata dia Sekretaris Fraksi PD di DPR Saan

bar spanduk provokasi," ujar Saan. Wakil Sekjen PD itu menyayangcode of conduct (aturan perilaku). an dari anggota kouthi yang telah menyepakati kesepakatan etika dalam kang. Padahal, PKS merupakan bagi kan sikap PKS yang terus membang-

membela kepentingan rakyat.
Atas ketidakhadiran PKS dalam dilakukan PKS, sambung dia, hanya lam code of conduct Setgab, Hal yang tainya sangat memahami aturan da-Abdul Hakim menegaskan, par-

pimpinan fraksi DPP, diubah menjadi dangan sebelumnya ditujukan kepada dua jam sebelum acara dimulai. Unkoalisi membatalkan undangan hanya rapat Setgab, Abdul menjelaskan

PKS, sedang berada di luar kota bersamaan, Anis Matta, ketuu umum kepada ketua umum partai. Pada saat

tidak tepat," kata dia menaikkan BBM saat ini memang rus DPD dan DPW PKS "Kebijakan pakan inisiatif dari pengurus-pengu tahkan penyebaran spanduk peno takan, DPP tidak pernah memerin lakan harga BBM. Kata dia, itu meru Sekjen PKS Tautik Ridho menga

tungan bagi PKS: 'Pembangkangan' PKS terkait kenaikan BBM berhasil yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq mengalihkan isu terkait kasus hukum penolakan harga BBM memberi keunni Indonesia Kay Kangkuti menilai Direktur Eksekutif Lingkar Mada

akan terus membangkang sehingga dikeluarkan dari Setgab. Sebaliknya, cul simpati publik. . dyah ratna meta PD merasa dikhianati sehingga munpova/muhammad akbar wijaya edi ratna puspita partai yang terzalimi. Karena itu, PKS keduanya ingin memosisikan sebagai Dengan persoalan ini, papar Ray



Spanduk berisikan penolakan kenaikan harga BBM terpasang di Jembatan Penyeberangan Orang, Jakarta, Kamis (6/6)

Ira Sasmita, Irlan Fitrat

SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD

EH Ismail, Esthi Maharani

JAKARTA — Silang kata antara politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus segera berakhir. Pakar hukum tata negara Asep Warlan Yusuf mengatakan, kunci penyelesaian dari polemik ini ada pada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan ketua koalisi.

"SBY mengalami dilema yang malah seperti menunjukkan dirinya bermuka dua," kata Asep, Jumat (7/6). Di satu sisi, SBY paham tidak bisa memaksakan sikap kepada DPR, di sisi lain SBY seolah tetap memaksa. SBY bisa saja memecat menteri asal PKS tanpa harus memerintahkan Fraksi PD memaksa Fraksi PKS menerima kebijakannya.

Kalau saat ini pemerintah

akan mendukung meski, ada dan solusinya. Bakyat tentu penjelasan mengenai kesulitan Pemerintah harus memberi fraksi yang menolak intahan secara konstitusional sidi BBM, kata Asep, itu mentah dalam mengelola pemeradi tanggung jawab pemerinkedodoran dengan beban sub

kontrak tidak ada hubungan-nya sama sekali dengan DPR korupsi dalam kabinet. Isi ningkatkan kinerja dan tidak kontrak köälisi hanya tertulis kekompakan itu unjuk me-Menurut Asep, imilah celah Asep mengingatkan, dalam

koalisi dan menteri-menterimengikat SBY sebagai ketua karena fraksi di DPR tidak di-ikat dalam hubungan koalisi. Kontrak "koalisi hanya yang dimanfaatkan oleh PKS

> naikan harga BBM dan mendukung kebijakan keasal PKS di kabinet menerima nya yang dari parpol. Faktanya, kata Asep, semua menteri

memutuskan apakah hal jiu cukup atau tidak dan apakah SBy merasa terganggu dengan kebijakan, Ejaksi PKS me-nolak kengikan harga BBM, "Tinggal-SBY saja iyang

ngindaan menilai sikap PKS "Harusnya PKS membeyang menolak kenaikan harga

kal dan sudah terlalu banyak subsidi sehingga APBN terkatanya, kemarin. Dia men-gatakan, kenaikan harga BBM itu untuk menyelamatkan fisrikan alasan yang tepat,"

Dia belum tahu apakah sikap PKS itu berujung pada sahksi dari Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi Menurutnya pembanasan mengenai PKS di Setgab harus tersendiri dan

khusus Kenaikan Kenaikan haipa BBM jiu hanya manu-yer ngija k dare PKS untuk memperband sutra mereka ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokra, Ahmad Muharok kenam Mubarok me berupaya meraih simpati ma-syarakat dengan membangun kesan dizatimi Setgab nuding PKS saat ini tengah

Domotral dan parpol. par pol peseria koalisi, kata Mu-barok, tidak akan mengeluar-kan PKS dan Setgab. Pihak-nya akan membiarkan PKS

ganggu. terganggu karena sikap PKS ngan sampai kondisi negara Menurut Mangindaan, ja-

Koalisi Tekan

gal

ıgsia

ar-

iri.

as

mjal

an

ins

ıh-

41.

ak

n-

e-

ab

a,

al.

v1)

e-

0-

or

m

th

15

n

Dyah Ratna Meta Novia, Muhammad Akbar Wijaya

SBY dinilai masih belum berani menjatuhkan sanksi.

JAKARTA — Anggota koalisi menekan PKS agar mengambil sikap yang sama soal isu BBM. Partai Amanat Nasional (PAN) meminta PKS berperilaku ibarat seorang makmum yang harus mengikuti imamnya, yakni

"Menurut pandangan saya sebagai politisi, namanya konsep koalisi ibarat orang berjamaah, ada pemimpinnya. Kalau dalam salat, imam rukuk, ya semua rukuk. Kalau imamnya salah, ada caranya menegur, misalnya menyebutkan subhanallah atau yang lain, tua Umum PAN Hatta Rajasa, kemarin.

Hatta menjelaskan pengibaratan PKS sebagai makmum dari koalisi pemerintah. Menurutnya, jika koalisi sudah sepakat soal harga BBM, seluruh anggota juga harus sepakat. Dan, yang terpenting, kata Hatta, adalah kon-sistensi. "Saya mengharapkan ada kesamaan di dalam kita. Menghadapi kesulitan harus bersatu. Ada pepatah yang mengatakan dalam kondisi penting kita harus menyatu," ujar pria yang menjabat sebagai Menko Perekonomian

Sama hainya dengan PAN, Partai Golkar juga meminta PKS kompak dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono bahkan meminta sekretariat gabungan koalisi mengambil sikap tegas terhadap

Agung mengemukakan, sebagai sesama anggota koalisi, partai-partai yang tergabung dalam sekretariat gabungan harus turut serta berpartisipasi menyukseskan kesepakatankesepakatan yang ada.

Sebaiknya, apa pun kita sepakati dengan cara demokratis, tinggal dilaksanakan saja. Terlebih, kalau menyangkut kenaikan harga BBM atau kompensasinya. Karena, 'ni menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Agung

Di pihak lain, Partai Demokrat memaksa PKS agar menyetujui kenaikan harga BBM. Jika menolak, Demokrat meminta PKS segera angkat kaki dari koalisi.

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi merr inta PKS bersikap tegas soal BBM. Kalau PKS masih ingin bersama koalisi, sebaiknya PKS mau mendul: ung keputusan koalisi untuk menaikkan harga BBM

PKS, ujar Didi, harus bersikap jelas dan kesatria. Mereka harus segera membuat keputusan terkait dengan sikapnya, bersama koalisi atau tidak. "Budaya siap mengambil risiko tidak dilakikan PKS," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Kalau mau bersama dengan koalisi, Didi menerangkan, PKS harus berani mengambil

harga BBM. Walaupun, kebijakan tidak populer ini akan dikecam oleh rakyat.

Mengomentari tekanan dari sejumlah partai koalisi, PKS mengaku tak terpengaruh oleh provokasi. Sekretaris Fraksi PKS DPR Abdul Hakim justru menilai, ada usaha provokasi yang dilakukan sejumlah pihak terkait isu BBM. Walau begitu, ia menegaskan partainya tetap akan berpikir jernih.

Menurut Hakim, perdebatan kenaikan harga BBM harus diluruskan pada implikasinya terhadap rakyat. Dalam kesempatan itu, Hakim menyayangkan adanya provokasi gelap soal isu BBM. Ia merujuk adanya beberapa spanduk gelap yang membelokkan isu PKS soal BBM.

Isu B

Centi

PKS 8

memi

anggo

Meng

sejala

yang

koali

berts

P

Kead

ngata

Rabil karti

naikk

subs

Mail Rabo

men

Maria

Tatif

adage nate

pers BBM

lakan

sikat

tenti

Menurutnya, spanduk resmi PKS hanya berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan tidak melebar ke isu lain, seperti penurunan pemerintah. Sementara, ada beberapa isi spanduk gelap yang mencantumkan penolakan kenaikan harga BBM plus seruan untuk menumbangkan pemerintah.

PKS hanya fokus pada penolakan kenaikan harga BBM dan kesejahteraan rakyat. Kami tidak ada keinginan untuk menurunkan pemerintah SBY-Boediono ataupun yang lainnya," kata Hakim.

Hakim menegaskan, jika ada spanduk yang mengatasnamakan PKS tetapi sudah sampai pada isu menurunkan pemerintahan maka dipastikan itu bukan dari partainya. "Sikap yang kami sosialisasikan kepada masyarakat fokus pada penolakan kenaikan harga BBM demi

kesejahteraan rakyat saja," katanya. Terkait tarik ulur soal PKS, pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai ketua koalisi, yakni Presiden Suslilo Bambang Yudhoyono (SBY), harusnya bersikap tegas. Namun, ia menilai, selama ini SBY belum pernah berani tegas terhadap PKS.

Sekalipun anggota koalisi terus menekan PKS atas sikap membangkangnya namun hal itu tak akan berarti. "SBY tidak pernah benarbenar secara serius menerapkan sanksi tegas bagi mitra koalisinya yang jelas-jelas tidak satu frame dengan kebijakan pemerintahan SBY," kata Gun Gun ketika dihubungi Republika di Jakarta, kemarin.

Gun Gun mengatakan, saat ini PKS merasa leluasa mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Mereka sama sekali tidak merasakan ketatnya batasan aturan yang ditetapkan dalam koalisi. Menurutnya, PKS telah belajar dari pengalaman politik mereka sebelumnya bahwa meski berseberangan posisi, mereka tetap akan aman.

PKS akan terus memainkan politik standar ganda hingga 2014. PKS tidak mungkin berani menarik menterinya dari kabinet meski secara institusi mereka memiliki pandangan berseberangan dengan pemerintah soal kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ia menyakini, PKS sudah siap dengan risiko didepak dari koalisi. Menurutnya, bila nanti SBY mer.depak PKS dari koalisi, hal itu akan dijadikan PKS sebagai amunisi pencitraan menuju 2014. PKS akan mamoei

KS Soal BBM

YANG BERTENTANGAN DENGAN PEMERINTAH DAN KOALISI:



Century 2010

h h

R

it C

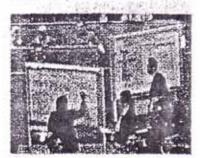
a

n 1 5

9

1

PKS bersama Golkar dan PPP memilih tidak bersepakat dengan anggota koalisi yang lain spal sikap DPR akan bail out Bank Century. Mengomentari sikapnya yang tidak sejalan dengan anggota koalisi. yang lain, PKS menyatakan bahwa koalisi yang mereka bangun hanya berlaku di pemerintahan.



s Isu kenaikan BBM 2012

PKS awalnya menolak kenaikan BBM, Namun, saat rapat paripurna terakhir, PKS ikut dengan pandangan koalisi yang setuju BBM dinaikkan dengan syarat.

@ RUU Ormas yang digodok oleh Kemendagri 2013

PKS menolak RUU Ormas menyangkut pasal penghentian keglatan ormas. PKS menolak pasal yang mengatur penghentian kegiatan ormas adalah kewenangan pemerintah.

• Isu kenalkan BBM 2013

DPP PKS menyatakan menolak kebijakan. kenaikan harga BBM. Da'am kesempatan rapat koalisi di rumah Wapres Boediono terkait BBM, PKS jadi satu-satunya partai yang

tak hadir. PKS beralasan berhalang an hadir akibat agenda rapat yand berubah

iadwal.



在新疆大型企图的大型设计的企业中,但是是一个一个企图的对象。在1980年中,

Perang Spanduk PKS Vs Demokrat

ua spanduk berjajar di atas jembatan penyeberangan Warung Jati Barat Jakarta Selatan. Spanduk di bagian kiri bertuliskan, "Tolak Kenaikan Harga BBM." Spanduk itu turut mencantumkan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hanya hitungan sentimeter di sebelah kanan spanduk PKS. bentangan spanduk lain justru menunjukkan dukungan atas kenaikan harga BBM. "Subsidi BBM Boleh Dikurangi. Perhatian ke Rakyat Miskin Wajib Ditingkatkan," begitu bunyi spanduk yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat untuk SBY (Arus).

Perang spanduk PKS versus spanduk dukungan kenaikan harga BBM tak hanya terjadi di Jalan Warung Jati Barat. Nyaris di sepanjang jalan Warung Buncit, Mampang Prapatan, hingga

kawasan Kuningan dibanjiri perang spanduk soal BBM. Yang menarik, perang spanduk ini mencatut dua nama kekuatan politik, yakni PKS dan Partai Demokrat, lewat Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY)-nya

Beberapa hari sebelum terjadinya perang spanduk, sejumlah kader PKS dan Demokrat sempat beradu argumentasi soal manuver pemasangan spanduk soal BBM. Kubu partai Demokrat mengkritik keras langkah PKS yang memasang spanduk

menolak kenaikan harga BBM. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyindir PKS agar tak hanya sekadar berani memasang spanduk tolak kenaikan harga BBM. "Kita tunggu PKS agar tidak hanya memasang pamflet menentang kenaikan BBM, tetapi juga pamflet antikorupsi, sindir Amir.

Petinggi PKS balas merespons pernyataan Amir. Anggota Dewan Syuro PKS Refrizal menantang Demokrat agar berani memasang spanduk dukungan menaikan harga BBM. Usai duel komentar di media itu. Jakarta pun disajikan duel spanduk

Tidak hanya aksi berbalas spanduk. Di sejumlah wilayah tampak sejumlah spanduk dukungan dan penolakan harga BBM dirusak. Seorang pengamen yang biasa mengkal di lampu merah Warung Buncit, Reski, mengaku kerap melihat beberapa orang warung Buncit, Keski, mengaku kerap melihat beberapa orang yang mengendarai sepeda motor merusak beberapa spanduk berisi pesan soal BBM. "Pas malam biasanya. Ada yang masang dan ada yang nyopot (spanduk)," ujar Reski kepada Republika.

Di sisi lain, aksi perang spanduk antara pendukung PKS dan pendukung SBY membuat gerah Pemerintah DKI Jakarta. Kepala Satpol PP Jakarta Barat Kadiman Sitinjak mengatakan,

spanduk soal harga BBM telah melanggar aturan.

Sebab, pemasangan spanduk telah merusak keindahan kota karena di pasang di sejumlah fasilitas umum, seperti jembatan layang dan pagar taman jalur hijau. Walhasil, Satpol PP akhirnya, menertibkan sejumlah spanduk itu.

Tindakan tegas terpaksa kami lakukan karena selain tak memiliki izin, spanduk-spanduk itu juga merusak keindahan

'ujar Kadiman.

Walau begitu, duel spanduk antara PKS dan pendukung SBY ternyata disyukuri oleh penjual spanduk. Pengusaha spanduk di kawasan Pejaten, Tarno (43 tahun), mengaku sudah sangat sering melihat spanduk PKS menolak harga BBM di jalanan Jakarta. "Spanduknya bahkan sampai ke Ciledug, Mas," ucap

Dia mengaku, hingga kini belum terciprat order spanduk dari PKS atau pendukung SBY. Tapi, lanjut dia, membuat spanduk seperti soal penolakan dan dukungan harga BBM tidaklah murah. Untuk spanduk berukuran 1 x 5 meter, harganya sekitar Rp 75 ribu sampai Rp 125 ribu. "Kalau yang seperti soal BBM itu, harganya sekitar Rp115 ribu," ucap Tarno.

Tarno mengaku sepang bila kedua kubu itu terus perang

Tarno mengaku, senang bila kedua kubu itu terus perang spanduk. Dia justru mendukung agar kedua pihak penolak dan pendukung kenaikan harga BBM terus berperang spanduk. "Bisa taku keras nanti," ujarnya tertawa.

ed: abdullah sammy

PKS Segera Tentukan Sikap

JAKARTA — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejehtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya ekan menggelar rapat pada Rabu (12/6) di Jakarta. Rapat ini untuk menyatukan pandangan partai itu terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Ini akan disamakan pandangan itu dalam Majelis Syuro. Jadi, tidak ada lagi yang beda, Rabu Irapat majelis syuro) di Jakarta, "katanya menjawab pertanyaan wartawan di Taman Makam Pahlawan, Ahad (9/6), seusai mengikuti upacara kenegaraan pemakaman almarhum Taufiq Kiemas.

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan untuk menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sikap sebagian pengurus DPP PKS yang menolak kenaikan BBM, bukanlah keputusan partai. Sikap penolakan kenaikan harga BBM, kata Tifatul, hanya sikap individu. Sedangkan, keputusan partai ditentukan di Majelis Syuro.

"DPP itu belum sikap partai. Artinya, itu wacana-wacana. Nanti itu akan dibulatkan di situ (rapat Majelis Syuro) karena DPP di bawah

menegaskan, sikap resmi partai terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan disampaikan dalam waktu dekat. ■ snara ed: abdulah sammy

kenaikan harga BBM bersubsidil," katanya. Dia

Majelis Syuro. Dewan paling tinggi di PKS itu Majelis Syuro. Wajelis Syuro ada 99 orang, katanya.

Sebelumnya, Fraksi PKS di DPR dan DPP PKS menegaskan menolak kenaikan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat. Kenaikan Abarga BBM dinilai tidak berdasar.

Selain itu para menteri dari PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II mengatakan, sampai saat ini tidak ada keputusan partai yang menolak kebijakan kenalkan harga BBM bersubsidi. Hal initah yang Kemudian dinilai terjadi perpecahan pandangan dalam tubuh PKS.

Dalam rapat Sekretariat Gabingan kenali selain dalam tubuh PKS.

Dalam rapat Sekretariat Gabungan koalisi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di rumah dinas Wakil Presiden Boediono pada Selasa [4/6], PKS tidak hadir. Ketua DPP PKS Indra membantah adanya perpecahan di internal partainya terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsid.

"Sikap partai dan fraksi sudah bulat akan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat

0/6/13

Namal

PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM

■ Muhammad Akbar Wijaya ...

jahtera (PKS) bulat menolak kenaik-an harga BBM. Sekalipun beberapa menteri PKS mendukung, partai bergeming pada sikap menolak BBM JAKARTA - Partai Keadilan Se-

BBM itu semata-mata karena yang bersangkutan berstatus pembantu presiden "Karena Pak Tif (Tifatul Pak SBY, dia harus petuh (mendukung kenaikan BBM)," kata Taufik ketika nyatakan mendukung kenaikan Menurutnya, menteri PKS yang medukung kenaikan harga BBM apabila petinggi PKS yang du-duk di kursi menteri justru men-Taufik Ridho tak mempermasalahkan Sembiring/Menkominfo) menterinya Sekretaris Jenderal DPP PKS

dhubungi Republika, Senin (10/6).
Namun, dia menampik perbedaan sikap antara menteti PKS dengan elite PKS di DPR merupakan cermin perpecahan di internal. Sebaliknya, Taufik menyatakan perbedaan itu justru menunjukkan membantu presiden. "Itulah bedanya profesionalisme menteri PKS dalam

bersubsidi. Sikap itu akan mereka perjuangkan melalui Fraksi PKS di DPR. "Fraksi sudah bulat kenaikan BBM saat mi tidak tepat," katanya. Taulik mengatakan, Fraksi PKS kukuh menolak kenaikan harga BBM

flasi yang berdampak pada keseng-saraan hidup masyarakat "Jadi, keputuan diambil berdasarkan ka-jian Bukan asal-asalan," ujarnya. Kenaikan BBM tidak berada da-lam momentum yang tepat. Sebab, anggota PKS di Komisi VII dan teiah meminta anggota mereka di harga BBM yang diusulkan pemekomisi terkait mengkaji kensikan kenaikan bakal mengakibatkan in-XI. ditemukan kesimpulan bahwa

harga BBM hanya akan membuat matahun ajaran baru. Alhasil kenaikan menghadapi bulan Ramadhan dan Belum lagi masyarakat akan segera tarif dasar listrik sebesar 15 persen pemerintah juga baru saja menaukkan dibebastugaskan dari jabatan struktural partai," ujarnya Dalam kesempatan itu, Taufik menegaskan bahwa DPP PKS bensimenteri dari PKS dengan partai lain. Menteri dari PKS langsung mundur

nanti musyarakat akan menghukum partai-partai yang menerapkan po-litik standar ganda. Sebab, menumeningkat. "Rakyat tidak percaya lagi," katanya. masyarakat terhadap informasi bakal rutnya, cepat atau lambat kesadaran Marzuki percaya, pada saatnya

dhoyono (SBY). # ed: abdullah sammy tik PKS kepada Susilo Bambang Yumenyerahkan sepenuhnya sikap poli-Partai Demokrat, kata Marzuki

ganda PKS soal BBM dilakukan sih memosisikan rakyat sebagai kedemi mendapat simpati masyarakat mengkritik standar ganda PKS soal Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie lompok yang buta informasi. ifal ini terjadi lantaran partai ma-Di pihak lain Wakil Ketua Majelis

sebagai pemilih yang kurang dan tidak mendapat informasi cukup," ujar Marzuki kepada Republika. Karena, rakyat masih diposisikan mengambil suara dukungan rakyat m, sikap ambigu hal biasa untuk "Dalam politik kontemporer saat

The day

syarakat semakin sengsara. "Masyarakat kecil akan semakin menderita pen den n

pad seki

Pen aku Koo Koo War

sya. uns 00%

Korupsi Atlet

PK5 tak Angg Demokrat M

■ Ira Sasmita

SBY menegaskan soal BBM tak ada kaitannya dengan hitunghitungan politik.

JAKARTA -Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukanlah mitra koalisi Partai Demokrat. Namun, PKS merupakan bagian dari partai yang berkoalisi mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Hidayat pun menyatakan bahwa PKS bukanlah bawahan Partai Demokrat. Sehingga, aneh menurutnya bila Demokrat memerintah PKS terkait sikap di koalisi dan menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)

"PKS bukan bawahan Demokrat. bukan cabangnya Demokrat. Aneh kalau Demokrat suruh-suruh PKS," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Bila kemudian Demokrat mendesak PKS untuk memasang bendera partai saat pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), menurut Hidayat, itu adalah hal yang aneh. Karena, hingga saat ini sikap PKS tetap menolak kenaikan BBM.

PKS juga tidak menyepakati bentuk kompensasi apa pun atas kenaikan harga BBM. Dengan begitu, Partai Demokrat disebutnya tidak perlu meng-

Harusnya, Hidayat melanjutkan, dalam alam demokrasi sekarang ini Partai Demokrat bisa berdebat dengan PKS menggunakan forum yang ada. Bukan saling menuduh dan menyuruh. Apalagi, melontarkan isu bahwa PKS menolak kenaikan BBM. Tetapi, malah mendukung kenaikan harga daging sapi

Menurut Hidayat, isu tersebut sangat menyesatkan. Karena, harga daging sapi tidak ada hubungannya dengan PKS dan Kementerian Pertanian. "Harga daging sapi itu naik atau turunnya terkait Kementerian Perdagangan. Dan, Menteri Perdagangan sekarang itu

1 整件型公司 书

A CASE TOWNSHIP TO THE BOOK OF THE PARTY.

menteri yang digadang-gadang oleh partai yang lain untuk jadi capresnya,

Hidayat mengharapkan Partai Demokrat bersikap dewasa dalam alam demokrasi sekarang ini dan tidak menunjukkan sikap otoriter PKS, menurutnya, akan segera menentukan sikap apakah tetap di pemerintah atau menjadi oposisi.

"Posisinya, kami menolak kenaikan BBM. Tapi, apakah kami tetap di koalisi atau tidak, itu keputusan majelis syu-ro berikutnya," kata Hidayat. Rencananya, PKS akan menggelar rapat majelis syuro pada Rabu (12/6)

Terkait kontroversi BBM itu, Presiden SBY akhirnya angkat suara. SBY meminta kalangan partai politik, media, dan publik tidak mengaitkan rencana pemberian BLSM dengan politik.

Hal tersebut disampaikan dalam akun Twitter Presiden SBY @SBYudhoyono. "Khusus tentang BLSM, Presiden SBY ingatkan parpol, media, dan publik untuk tidak kaitkan dengan politik. Ini benar-benar untuk bantu rakvat tidak mampu," demikian salah satu tweet dalam akun tersebut.

Dalam tweet lainnya disebutkan pemberian kompensasi bagi rakyat tidak mampu terkait rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Dia berharap agar diberikan serentak saat pengumuman penyesuaian harga BBM.

"Kompensasi terdiri dari beras miskin, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, dan bantuan langsung sementara masyarakat." demikian salah lbab. satu *tweet* lainnya. Se ble ata

Di pihak lain Wakil Ketua Majeli Tinggi Partai Demokrat Marzuki Ali menyerahkan sepenuhnya posisi PKS e koalisi kepada SBY Menurutnya, SBY koalisi kepada SBY Menurutnya, SBY diri sel lah yang paling mengetahui apaka ingan menteri-menteri PKS masih perlu di pertahankan di kabinet atau tidak yan " "Koalisi dinimpin SBY" utarnya Koalisi dipimpin SBY," ujarnya. Kendati begitu, Marzuki menyata

kan, mayoritas kader Demokrat berharap ada sanksi yang diberikan ke par tai politik yang gemar melakukan perselingkuhan politik "Sikap kader sangat jelas bahwa setiap perselingkuhan politik pasti diberikan sankkuhan politik pasti dibelikan saila PDI i si Berbeda dengan SBY yang melihat ak to kepentingan yang lebih luas," katanya Taufiq.

ACTOR NO.

antara ed abdutlah sammuskan

ti Taufi

PDI

on

Re

Ser

Hak

olu

bisa

i m

tus s

lara

n sa

kes

id K

naka

Justi

men

ang b

1-1

t harus

00 /28 Haleman JAWA Rp 4 500 sh angkes kirim

Feodoliu Online Orapublikooslite C

Muhammadiyah Sayangkan Aturan Polri

OJK Kembangkan Basis Investor 14hm 14



Korut Putuskan Hubungan im 20

KHAZANAH Him 21-22428



13/6/13

SETGAB KELUARKAN PKS

Parpol anggota Setgab ingin mengeluarkan PKS karena sering tidak sejalan.

■ Ira Sasmita, Esthi Maharani

JAKARTA — Hubungan Partai Kesdilan Sejahtera (PKS) dan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pemerintah semakin tidak harmonis. PKS bahkan menyatakan mereka sudah dikeluarkan dari kositsi.

Wakii Sekretanis Janderal DPP PKS Fahri Hamrah menyatakan, menteri dari PKS menerima informasi bahwa partai berlam-bang bulan dan sabit itu sudah dikeluarkan

bearg bulan dan sabit fiti sudah dikeluarkan dan Setgab, pekan lala. Informasi iti darampaikan secrang menteri Kubinet Indonesia Bersatu yang mengaku utusan Presiden SBY Informasi iti diperkuat keputusan Setgab Indonesia Bersatu yang mengaku utusan Presiden SBY Informasi iti diperkuat keputusan Setgab Indonesia Belanja Negara Perubahan (BAEBN-P) 2013 pada Selasa (11/6) malam. Pada rapat itu, Setgab membahas Rancangan Anggeran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (BAEBN-P) 2013 pada Selasa (11/6) malam. Dia juga tidak mau menjelakan menteri dar PKS yang mererima pasan itu. Sa-pa kira hal itu tidak penting disaman palakan kepada pidibik, tapi penting tidak mau menjelakan menteri dar palakan kepada pidibik, tapi penting tidak mau menjelakan menteri dari palakan kepada pidibik, tapi penting tidak mengelik penting tidak mengelik penting tidak mengelik penting tidak mengelik penting tidak mau menjelakan menteri dari palakan kepada pidibik, tapi penting tidak mau menjelakan menteri dari palakan kepada pidibik, tapi penting tidak mau menjelakan mengelikan mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan penting tidak mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan mengelikan tidak mengelikan tidak mengelikan tidak mengelikan tidak mengelikan tidak mengelikan tidak mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan tidak mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan mengelikan tidak yan, Jakarta, Rabu (12/6)

PKS sodah bersap membahas keputusan Setgah kemarin Namun, agenda itu batal karena PKS belum menerima surat dari Presiden Syks delim menerum ausa president pimpinan Selgah. Berdatarkan indonan dari utusan istaha, Pahri menuturkan, SSP sakat mengirimkan surat pemberhenian PKS dari Selgah pada Sebin; B Juni lalu Namun, ditungga hingga Sebin (10/6) malam; PKS belum mengeran ausa terakut

ditunggu hingga Senin (10/8) malam; PKS belium menerima suriat tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahluda Siddiq mengakui PKS tidak khawa-indika di pungakui PKS tidak khawa-indika menyatakan, PKS manih menunggu surat rekmi dari SBU.
Hubungan PKS-Demokrat-SBY tampak tah harmonis sejak kasus bedieut Bank Century dipersusikan Timwas Century DPR. PKS bersama Golicer paling keras mendorma dibengkarnya kana yang menujakan negara

dibongkarnya kanas yang merugikan negara Rp 6,7 trilian itu Hubungan PKS-SBY makin panas terkait

kasus dugaan korupti impor daging sapi yang menjerat manian presiden FKS Luthfi Hasun Ishaaq. Belakungan, PKS menolak keras rencara kenatkan barga HBM yang akin di-

Spandok-spanduk enolakan kenaikan rga BBM terpasang di sejumlah kota di Tanah Air yang dihuat kader PKS.

kader PKS.

Wakil Ketua Umum
Partai Golkar Sharif Tjirjip
Sutarjo mengatakan, parpol yang tergabung dalam
Setgab sebenarnya ingio Setgab sebenarnya ingizi mengeluarkan PKS karma sering tidak sejalan, Meski demikian, menurut dia, belum ada keputusan mengeluarkan PKS Sekretaris Dewan

Pembina Partai Demo-krat Jero Wacik belum mengetahui informasi Setgab sudah

sepenuhnya ada di tangan SBY Menten Koperasi dan UKM yang juga Sekretaris Setgab Syarief Hasan menambahkan. Syariet Hasan menamusansan, PKS miemang sengai a tidak diundang pada rapat Selasa malam. Sebab, PKS telah menyatakan sikap menolak denalikan JBM dalam berbagai kesempatan, bershauk data kompenyat.

patan, bermitauk data kompen at.

Setgab, kata Syarief, kecewa sikap
FRS yang memilih berbeda atar renamapemerintah itu. "Semus anggota Setgab
kecewa dengan sikap FRS. Seharunnya
kita bersama-sama bekeraju untuk kepentingan rakyat," kata dia
Dalam keterangan pendi latana, SSY
meminta semus pitako mendukung tenunan pemerintah menakkan hang BBM.
Dia mengatak para elih politik medimorduakan kepentingan menjelang Pemilu
2014 terkait kebijakan im.
SBY menyatakan, kebitakan menaikkat

2014 terkali kebijakan ini.
SBY menyatakan, kebijakan menalikian
harga BBM bukanlah perkara mudah. Is
mengaku tidak senang dengan hal tersebut.
Namun, menalikan harga BBM merupakan
jalan teral-hir yang terjaksa dijalankan.
Penghitungan pemerintah pun bukanlah
asal-asalan. "Saya berharap jangan terlalu
mudah menghalum bahwa mereka mencintai rakyat, kami semua mencintai rakyat,
kata pli Ketua Uhuun Partai Demokrat itu.





13/6/13

teru

ma tuha ting

mer kan rup jala tiap

yan but me dol bat

me

efe

hut

iπv

dar

Lai

un

jac

m

Setgab Tunggu Sikap PKS

■ Esthi Maharani, Ira Sasmita

PKS menyatakan perbedaan sikap seharusnya tidak diartikan sebagai menantang.

JAKARTA — Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pemerintah dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih saling menunggu untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Setgab menunggu PKS segera mengakhiri persoalan ini.

T

t

г

ii

i,

g

3-

ık

0-

n-

an

ni.

15-

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Tjitjip Sutarjo mengatakan, PKS diharapkan segera mengambil sikap dan memutuskan masa depannya di dalam koalisi "Kami menunggu dari mereka yang akan bicara, Jadi, kita menunggu mereka (PKS) keputusannya seperti apa," kata dia, Rabu (12/6).

Konflik PKS dan Setgab bermula dari rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu bensin menjadi Rp 6.500 dan solar Rp 5.500. PKS menentang rencana kenaikan BBM bersubsidi itu. Termasuk dana kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.

Bahkan, kader-kader PKS memasang spanduk yang menolak kebijakan pemerintah. Selain karena memicu inflasi. PKS menganggap pemerintah kerap mengabaikan usulan mereka terkait pengelolaan energi

Ini berbuntut memanasnya hubungan PKS dengan Setgab. Sebagai anggota Setgab. PKS seharusnya mendukung rencana pemerintah. Bahkan, PKS menyatakan Setgab sudah mengeluarkan mereka dari koalisi.

Sekretaris Setgab Syarifi Hasan mengatakan, Setgab Mah sepakat dengan strategi BLSM sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi. Pembahasan RAPBN-P 2013 diharapkan segera tuntas agar alokasi untuk BLSM dan bentuk kompensasi lan nya atas kenaikan BBM bisa diimplementasikan. Karena itu, politisi Partaj Demokrat ini menyatakan, PKS seharusnya mengetahui konsekuensi atas sikap penolakan itu jika berpedoman pada code of conduct atau kode etik Setgab yang sudah disepakati. Dalam kode etik itu, anggota koalisi dituntut kebersamaannya jika terjadi ketidaksepakatan di dalam koalisi, terutama menyangkut isu strategis.

Jika tidak ditemukan solusi bersama, parpol yang tidak bersepakat dapat mengundurkan diri dari koalisi. Jika parpol itu tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi papol telah berakhir.

Anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini menolak anggapan partainya melakukan pembangkangan Kenaikan BBM ber-subsidi tidak tepat dilakukan saat ini.

Hal itu juga sesuai dengan keinginan masyarakat. Atas sikap penolakan, PKS juga menawarkan solusi terkait kebijakan energi. "Perbedaan sikap jangan dimaknai me nantang, apalagi dinilai melakukan pencitraan

d ed: ratna puspita

HARGA BBM. TAP) TETAP TIDAK INGIN

Bambang Yudhoyono (SBY) tidak luga membang hang mag mag paditik mereka dalam Sekreturai Gag balan Sekreturai Gag bang bengan pangi (Seegab) Koalia Sekreturai Gag Meski mengebat (Seegab) Koalia Semeriniah tengan pangi dalam bengan pangi dalam bengan bengan bengan dalam bengan bengan bengan dalam bengan bengah fa pum membanah dapak PKS dari kealia Sembicasan liu. Seda tengah pengan bengan membanah dapak PKS dari kealia Sembicasan liu. Seda tengah mengalumkannya dari mending PKS yang mebananya dari barap Presiden mengelumkannya dari meni barap Presiden mengelumkannya dari meni pemberbentua PKS dan dia yakiri barap kemban dan Say tidak akan mengelumkannya dari serai pemberbentua PKS dan dia yakiri barap kemban luga PKS yang mencihak kebaharapkan. kata Seda Kema (1976). kecesa atas shap PKS yang mencihak kebaharapkan sasa shapabarapkan sasa shapabarapkan

IKap PKS Sugan Tega

Dyah Ratna Meta Novia

Jumlah rakyat miskin hingga empat juta-lima juta orang.

JAKARTA — Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah tepat. Sebab, kenaikan harga BBM yang akan dilakukan menjelang Ramadhan akan menyengsarakan rakyat.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah mengatakan, kali ini PKS bertindak benar dengan menolak kenaikan harga BBM. "Saya bukan pendukung PKS, tapi penolakan kenaikan BBM harus didukung semua pihak," kata dia, Kamis (13/6).

Kenaikkan harga BBM bersubsidi akan membuat rakyat menderita. Apalagi, harga BBM dinaikkan menjelang Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri pada Agustus.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juni. Bensin Premium akan dinaikkan menjadi Rp 6.500 dan solar Rp 5.500. Meski demikian, PKS yang berada dalam

koalisi pendukung pemerintah justru menolal rencana ini. Termasuk, dana kompensasi yan akan dialokasikan pemerintah dalan Kancang an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar Perubahan (RAPBN-P) 2013.

PKS tidak séndirian dalam penblakan ini Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islar (PB HMI) dan éksponen Aktivis 98 juga menen tang réncana pemerintah yang akan semaki menyisahkan rakyat kecil

Ketua Umum-PB HMI Muhammad Arif Rosyid Hasan menyadari partai politik memilik kepentingan di balik pengambilan keputusa untuk mendukung atau menolak kenaikan harga BBM Meski demikian; HMI tidak meliha urgensi menaikkan harga BBM saat ini.

Rombongan Aktivis 98 juga menolak ke naikan harga BBM. Bahkan, meteka menyebi menalkan harga BBM sama dengan menyebi sarakan rakyat dan melanggar konstitusi UU 1945. Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis 9 Ubedillah Badrun mengatakan, kenaikan harg BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah empi juta-lima juta orang

Dana kompensasi juga dinilai tidak men beri efek positif bagi penderitaan rakyat

med: ratna puspi

PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik

Muhammad Akbar Wijaya

JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyiapkan gelombang penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan kadernya memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM.

Perintah Megawati itu tertuang dalam surat yang diteken pada 5 Juni 2013. Dalam surat itu, Fraksi PDIP diinstruksikan menggalang dukungan rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM dan memasang baliho, spanduk, atau media komunikasi lain.

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto membenarkan adanya instruksi Megawati yang meminta kader PDIP memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM. "Kami memang akan memasang spanduk sesuai arahan ketum (Megawati)," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/6).

Kenaikan BBM memang



PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik

Aldu Newwilp Suza syspans sebijakan itu. Karena itu miliki hak santak mengkerhen Natu Bambarg (1911) jupi me on other anguage webiter uk babya berisi pepulakan soman pemerintah Naman Anni perpupantan and mari

Bambang, akan berdampun asums persenniah yang me-Angka itu lebih tinggi miri tukal mencapat II,5 persen tok PDIP memperatikai haftası BSM akan memiru kewatkan Jumpak langotannya, jumbah ada daya beli masyarakat 68M naik menjadi 1,5 pesen ugatakan imbas dan besulain and sequipping guested educa-Inflasi yang tinggi, kuta

saja banyak yang ekonominya beli rakyat akan tunus, testu flass yang tinggi, maka daya

Authorities (III, Mutagan) masyarakat (BLSM) untuk mengantisipasi hertambahnya program ini dinilainya tak umlah rakyat miskin, Namun bantuan langsung sementara kompensasi dengan nama rencana meluncurkan dana akai menuntaskan persoalan Peterintah menaga Pr

merintah semestunya membangan pemberdayaan ekonom out "Kelm tolan BLSM to perkuat basis ekonomi perte hut Missalaya, dengan menmasyarakal secara bermata Bambang menyatakan, pe-

当日中田

mayat miskin bertambah. "Inatuh, katanya

diterikan seara luna

Destruction Bellings -is Junctury preprintations tin (17/6) depan. Ketua Piaksi kap pendakan itu POP Psan Maharani akan

menalikhan hanga 188M ber-2013 yang sedang dibukus DPR garan Pendapatan dan Debaga jukan dalam Rancangan Angthen matrix BLSM suction dissubsidi pada bulan ini. Alokasi legara Perubahan (BAPBNP) Petteriatah pencanatiya

Sejahtera (PES) menyaarakan Sebelumnya, Partai Keadilan lakan kenaikan harga BBM edia yang menjatakan peno-PDIP merupakan partai

dar Nim 1

Hampadian sakap nomi me-Fraks PDP akan 异 an Partai Koaliss pemerintah angerta Sekretariat Gabung dan Partai Demokrat terus Sebagai imbas dari sikap pemerintahan, sedangkan PKS partacyang berada di bar pe-Strength nolakoa itu, habungan PKS

turnati baga partan politik. PKS seharusnya mengambu luar pemerintahan bukan karsudah salah arah. Berada di nilai kebijakan pemerintah sikap sebagai oposis Jika me-Bambang mengatakan

basi my, paku mpmelan PDIP tetap tesa memanjutaan gai oposisi, kata Bambang Scharts dus periode seba-

der PKS juga sudah lebih dulu penolakan serupa. Kader-kakenaikan harga BBM. menasang spanduk pendakan

Bedanya, PDIP merupakan

tah," kata Sutan.

contohkan, banyak spanduk skap partai yang menolak keyat dan dijadikan penutup naskan barga BBM. Dia mencultup cerdas sintuk menulai Sutan, meyakini masyarakat milik PKS yang dicopot rak-

Mangage Life kita hidap. Dua periode puta, Kétua Dewan Pimpinah

(PDIP) kun oposisi. Sedagkan suarakan PDIP merupakan menolak kebijakan pemennnti newezy, zelen Buei jen the Bush uppersoners are PKS ada di issalisi, masak an, pendakan terhadap ketiutan Bhatoegana mengata-

Partai Demokrat, kata

warung "Rakyat yang akan

lahan mati. Tapi nyalanya, bilang kalau di luar pemerin-

Most (DPP) Partai Demokrat

peneratah Sebaliknya, PKS dalam koalisi bukan lantas dhoyono berubah pikuran, tidak bisa mengritik kebijakan Presiden Sustio Bambang Yuspang katau mentik pengaaman sebelumnya. extra berharap bisa membuat PKS berpendapat, berada

ga BBM, tapi batal "Kemungkinan berubah (batal ga berencana menaikkan harada, "kata dia Bek-retra propia Tahun lalu, pemerintah ju-

belah bambu. Ini seperti podischemotrat sebagai purta gunakan Belanda litik dende et impera yang diyang saka melakuskan politik PKS litris Luthifi balls menstopul attent titlab, data Suban harga BBM keputosan yang menilai apakah kenaikan Auggota Majelis Syuro

Menter: Pr のでだいうこ

Ira Sasmita, Diah Patna Meta Novia

menteri PKS di kabinet. PKS dan Istana sama-sama

di tangan Presiden Susilo Bumbung nemui kejelasan. PKS menyatakan JAKAFTA — Posss menters yang berasal dari Partai Koadilan Se-jahtera (PKS) di kabinet belum me-Negara menilai PKS hak mencabut jabatan menteri ada sedangkan pihak Istana

tersebut bukan tergantung partat, apa-lagi jika disangkutkan sengan sikap PKS menolak kebijakan pe-merintah menaikkan harga bahan bagai menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Suzilo Ham-bang Yudhoyono (SBY). Keputusan Ketua Fraksi PKS di DPR Hida-11 Nur Wahid menegaskan penco-pomakader PKS yang-penjabatan

S

bakar minyak (BRM).

Bild menununya telah disepakati Majelis Syuro PKS. Namun, tiga orang kadar PKS yang menjabat menteri menyatakan mendukung kebijakan pemerintah SBY Tiga kadar tersebut adalah Tidaul Semander tersebut adalah Tidaul Semanakater dan informatika, Suewono sebagai menteri pertaman, dan Salim Segaf Al Jufri sebagai pembantu SBY dalam Sebagai pembantu SBY dalam kabinet, kata Hidayat, sudah sewabiring sebagai menteri komunikasi dan informatika, Suswono sebagai

kanan, Eggung Eggung Kata

Ram-pend-k, Ke-

Ia merngaskan, SBY tidak per-nah membedakan atau memperna-salahkan lagi dari mana dan partai apa seorang menteri berasal. Se-luruh anggotu kabinet dipertakukan SBY sebagai sebuah tim.

Heru menambahkan bahwa se-telah duduk di dalam kabinet, tidak

ıslanlam kebiyələri isləY. Karena itu, ketegatan PKS menolak kenatkan hargi NBM dan penopotan menteri terkalı sikap itu enenurui Hafayat tak teşat dilemparkan kepada par-

"Undang-Undang tidak mem-berikan kewenangan partai untuk menarik para menteri. Di UU dan code of conduct juga disebutkan itu hak pretogati prentiden, "kata Hi-tiayat di Kompleks Parlemen, Se-nayan, Jakarta, Semin (1746). Hidayat menyudata, ikkap PKS memolak kenalken barga BBM ahan membuat posisi mereka di koalisi diabatkan, Indikasinya, dalam be-terapa kali pertemuan Setgab, PKS gapa tidak diandang. Meski demikian, ia menegaskan

soal pencopotan menteri adalah we-wenang presiden. Bila Presiden Saatlo Bambang Yudhoyono merasa menteri dari PKS tak bi<u>aa bakarja</u> optimal, adalah haknya untuk mem-

Diphera Jain, Staf Khusus Fre-Diphera Jain, Staf Khusus Fre-sideh Bidang Komunikasi dan In-fernasi Heru Lelono menilai ucapan Mayat tak tepat. "Apakah mereka Jupenahwa nama ketiga mapa-tersebut 1966 candini 1970 meng-usukani" kata Heru Lelono, di Ja-karta, kemarin.

bahwa nama ketiga mengusulkan? menteri tersebut PKS sendiri yang Apakah mereka lupa

boleh lagi anggota kabinet tersebut hanya bekerja untuk kelompolonya, apelagi partasinya, kecuali untuk solumb rakyat. Menurutnya, secura etita politik, upabila ketiga menteri PKS tak sejalan dengan kebijakan

Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2011) Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) Riwayat Jatah Menteri PKS Kabinet Indonesia Bersatu II (reshuffle) Providen SSV mentyeldir ketagbadiran promit Providen SSV mentyeldir ketagbadiran promit Providen SSV mentyeldir ketagbadiran promit Tiga menteri dari PKS tak menghadiri sidang kabiner yang digelar di kantor kepresidenan kenganya meminta tan mengikuti tapat nternal PKS THE PARTY OF THE PARTY OF 886 DURING grang grang

pariai, mestinya mereka diputus kenggotaannya eobajai koder. Bahwa puncabutan menteri oleh parpol tak ada dajam undang-un-dang dan code of conduct, kata He-ru, tak masalah. Para menteri bisa ditarik PXS dengan alasan etika

la menambahkan, penyesuaian la menambahkan, penyesuaian harpa BBM berkaitan dengan membergkaknya anggaran subsidi sudah terkoton oleh masalah yang berbau serbapolitik. "Akibatnya, hal yang lebih besat rerabahkan ini menang pilihan kebijakan yang sulit dan tidak populer, namun menjadi serabakn ramit kalau radonolitas cara berpikir semakin ditinggalkan," katanya Sihap saing kunci antara PKS

ANAK TIRI KABINET

19 Oktober 2011

juga hanya menunggu dikeluarkan dari koalisi karena munolak kenaik-an harga 183M. "Jaak Demokrat maupun PKS akan saling menunggu om King. Demokrat hanya beranj menggertak. EKS. juntuk. segera mundur dari koalisi tanpa berani mengeluarkannya. Sedangkan, PKS berakhir segerii. Pengamat politik dari 1965, Hanta Yadhu, menga takah, baik Demokrat maupun PKS sama-sama beraikap seperti macan dan Demokrat dini okrat hanya berant

satu sama lain." kata Hanta Menurut Hanta, daripada saling menunggu, lebih baik PKS keluar dari koalisi. PKS segera menarik menterinya dari koalisi dan fokus memenuhi keinginan konstituennya

yang merolak kenakan harga BBM.

Keuntungan keluar dari koolisi,
PKS menpunyai ruang manuver
yang lebih luas," kata dia
Jika PKS terta melakukan politik dua kaki, terta Hanta, yakni
tetap menjadi bagian dari koalia,
namun menentang kenakkan harga
BBM, secara pensepri politik, sikapnya dinilai kurang baik. Terfebih
lagi, sebagian besar ampatiaan PKS
ingin partai tersebut berada di luar pemerintahan.

luar dari koallat tidak bita mengun-tungkan atau merugikan PKS se-cara mutlak Jiko FKS keluar dari koalisi, akseenya terhadap kekuasa-an akan terputus "Namun, itu ma-lah memperbatki etta PKS," ka-tanya. Wanasa eti tuyan serasa-Hanta mengamini, pilihan ke-

Juni 2013 / Nasiona)

engawas.

10 jalur

tan Oleh

igkatkan

lah jalur

napi itu

smahan

yang

tangan.

a tetap

lengan'

tversi...

Mas-

kasus

eniadi

mara

i me.

mbe-

t-be-

lasil

dam

igan

Ini-

RUST

le.

iba.

Sikap fraksi menolak kenaikan harga BBM bertentangan dengan keputusan DPTP.

JAKARTA Penolakan Fraksi PKS terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di DPR dinilai menyalahi instruksi Dewan Pimpinan Tinggi Pusat (DPTP). Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, sikap Fraksi PKS di DPR akan dievaluasi.

"Nanti akan ada evaluasi dari hasil keputusan semalam," kata Tifatul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/6). Hasil sidang paripurns akan dibawa ke DPTP PKS untuk ditelaah. Akan dikaji apakah sikap DPP dan Fraksi PKS sudah selayaknya.

sama PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura tersebut kalah melalui mekanisme coting.

Tifatul menjelaskan, sikap Fraksi PKS di DPR tersebut bertolak belakang dengan keputusan raput DPTP di Lembang, Bandung, pada 12 Juni 2013. "Kalau berbeda, itu berarti penyelewengan dari instruksi (Lem-

Menurut Tifatul yang juga menjahat menteri komunikasi dan informatika, dalam kesepakatan di Lembang, PKS mestinya tak bersikap soal repcana kenaikan BBM, Sikap Fraksi PKS terkait rencana tersebut adalah menyerahkan kewenangan menaikkan harga BBM ke pemerintah tanpa

3 Okt 2011 Anggota Komisi st Fraks: PKS Fahri Hamzah menyerukan pembubaran KPK 22 Mei 2013 Ketwa Dewan Syariah dan Fahri Hamzuh kembali DFP kemudian mengklarimenggelontorkan fikusi, pernyataan tersebut isu bahwa bukan sikap partai kebanyakan kadar PKS menginginkan keluar dan Koalin Setgab. Dewan Syuro PKS menyangkal dan memutuskan tetap berada Menjelang perombakan dalam koalisi Kabinet Indonesia Bersatu II, terjadi beda pendapat di internal PKS soal tetap berada di Pendiri PKS Yusuf Supendi koalisi atau ladi coosiu melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Menten Komunikasi dan Majelis Syuro PKS Hilmi 17 Jun 2013 Informatika PKS Tifatul Aminuddin, dan Sekretaris sembiring menyatakan, Jenderal PKS Anis Matta ke Seluruh anggota sikap fraksi PKS adalah Fraksi PKS di DPR Badan Kehormatan DPR penyelewengan dari Mereka bertiga dituding menyatakan menyisi keputusan Dewan menyalahi kode etik dinakkannya harga Fimpinan Tingkat. anggota DPR BBM bersubsidi Pusat (DPTP) dalam rapat di Lembang, Bandung.

perlu persetujuan DPR.

Ia menegaskan, penolakan oleh kader PKS terhadap kenaikan BBM hanya diperbolehkan dalam tataran opini.

Lain halnya dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan kompensasi lainnya. Kendati tak secara gamblang disebutkan dalam kesepakatan dan instruksi di Lembang, sikap PKS mestinya mendukung "Terjemahannya begitu. Mendukung BLSM, BBM, Jamkesmas, Raskin," ujarnya.

Selain keputusan soal sikap terhadap kenaikan harga BBM dan kompensasi, ada sejumlah

kesepakatan lain yang juga dihasilkan. Di antaranya, soal penurunan spanduk penolakan kenaikan harga serta menahan diri dari mengomentari rencana pemerintah tersebut.

Terlepas dari penyelewengan instruksi, penolakan yang dilakukan Fraksi PKS, dinilai Tifatul, merupakan barn basan berpendapat.

Ketua DPP PKS Nasir Djamil menyangkal pernyataan Tifatul soal penyelewangan instruksi Lembang, Menurut Nasir, sikap Fraksi PKS sudah sejalan dengan keputusan resmi partai. "Tidak ada pelanggaran keputusan

Lembang. Sejak awal, kami tolak kenaikan BBM dan konsisten mempertahankan," kata Nasir

Menurutnya, pertemuan anggota DPTP tidak spesifik membahas sikap Fraksi PKS terhadap kenaikan harga BBM. Pertemuan hanya membicarakan kondisi terakhir PKS. "Itu hanya pertemuan biasa yang membahas dinamika terakhir internal."

Nasir menilai, pernyataan Tifatul wajar lantaran saat ini Tifatul berada dalam posisi sebagai menteri pembantu presiden. Baginya, apa yang disampaikan Tifatul hanya soal perbedaan pendapat. # ed: Striyer zancar

Internal PKS Saling Tuding M Akbar Wijaya, Esthi Maharani

Dalam sidang paripurna di DPR, Senin (17/6), Fraksi PKS tegas menyatakan penolakan terhadap kenatkan harga BBM bersubsidi yang diatur dalam APBN-P 2013. Suara PKS ber-

bang)," kata Tifatul.

Te ba no (Bi kar gel tul tier bel kat spe Sel ape kar Pole 31415 for per:

> stab oper bers Hend 23470 lains

Dan

Pold sihr di la men Mali men Brit test Tre

hut

ten me chi ted Ud DØ

Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY

 Oleh M Akbar Wijaya, Dyah Ratna Meta Novia

yang tergabung di Sekretarial Gasilo Bambang Yudhoyono (SBY). bersubsidi membuat partai koalisi gab menunggu langkah tegas Subungan (Setgab) koalisi gerah. Setretaris Setgab Amir Syamsúddin di pada ketua koalisi (SBY)," kalg Sek-Kompleks Parlemen Senayan, Se-"Posisi PKS kita serahkan kez menaikkan harga BBM an Sejahtera (PKS) menolak kebijakan pemerintah ikap Fraksi Partai Keadil

Pembina Partai Demokrat membantah bila partainya menjadi kunci pemendepak atau mempertahankan nentu nasib PKS di koalisi. Sebab dalam konteks koalisi, kewenangar partai ada di tangan SBY. "Kurang te-Tergantung ketua koalist, "ujarnya. pat kalau dikatakan Pertai Demokrai Amir yang juga anggota Dewan

masyarakat yang menilai, masya-/ tuk menaikkan harga BBM. "Biarlah lisi dalam membuat kepulusan un-PKS karena tidak mendukung koapartainya tidak akan menghukum Nurhayati Ali Assegal mengatakan, rakat yang lebih berhak menentukan sikap sebab mereka yang -Ketua Fraksi Partai Demokrat

memiliki suara," kata dia, kemarin akan main hakim sendiri, la menilai, reka sudah tidak sejalan dengan seharusnya PKS sebagai anggota ketuar, ujarnyakoalisi. "Bukan menunggu disuruh koalisi sadar bahwa tindakan me Demokrat, ujar Nurhayati, tidak

lu juga menunggu Presiden SBY unsejalan lagi dengan pemerintah, selau memang sudah merasa tidak mengeluarkan menteri mereka. Katuk menggunakan hak prerogatifnya harusnya PKS mengundurkan din PKS, lanjut Nurhayati, tidak per

yang berasal dari PKS meminta agar urusan pemerintahan dan koa-Menteri Pertanian Suswono

dengan kenaikan harga BBM.

tenaga profesional," katanya saat lisi diserahkan kepada partai. ditemui di kompleks Islana Kepre-Mereka yang lakukan komunikasi loyal kepada presiden. Urusan koakami konsentrasi bekerja sebagai Menteri-menteri kan harus

gas-tugas kementerian selama 5BY, a esthi maharani ed: fitrijan zamitarni sidenan, kemarin. belum ada kepastian dari Presiden la tetap akan menjalankan tu-

lisi dibedakan, la mengatakan, sebagai menteri yang berada di bawah mendukung kebijakan yang diambil Presiden SBY harus patuh dan pemerintah Termasuk, terkail

yang

0 -- 2203

PKS Didepak, Menteri Aman

Esthi Maharani

, h

10

p

si

JAKARTA — Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, kepastian terkait keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Setgab Koalisi akan dibahas selepas pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Syarif mengindikasikan, semisal nantínya PKS didepak, menteri asal parpol itu di kabinet aman.

'Insya Allah akan dibicarakan setelah pengumuman ke-naikan BBM," kata Syarief Hasan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/6). Syarief mengatakan, sikap PKS menolak kenaikan harga BBM yang digagas pemerintah dalam rapat paripurna di DPR akan menjadi pertimbangan.

Syarif memberikan sinyal tidak akan ada perubahan apalagi pencabutan terhadap menteri dari PKS. "Ada perbedaan, kita kan berkoalisi dengan partai bukan menteri," katanya.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha angkat bicara soal nasib PKS di Setgab Koalisi. Mengulangi penegasan anggota parpol Setgab Koalisi, karena telah menyalahi code of conduct, PKS mestinya mengundurkan diri sebab kebersamaan di Setgab sudah selesai.

"Kala parpol bersangkutan tak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi telah berakhir atau sélesai," ujar Julian, kemarin. Menurutnya, secara etika, setiap anggota koalisi parpol wajib

menjalankan semangat kebersamaan, utamanya menyangkut kebijakan politik yang strategis.

Karena isu yang jadi perdebatan, yakni rencana kenaikan harga BBM sangat vital, mestinya PKS mendukung pemerintah. Pembangkangan PKS secara otomatis membuka pintu bagi mereka untuk mengundurkan diri dari koalisi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu menyampaikan secara langsung sikap resmi terkait PKS. Presiden bisa menyampaikan melalui juru bicara atau pengurus Demokrat.

PKS seharusnya sudah memahami konsekuensi berseberangan pendapat dengan anggota setgab lainnya. "Kalau orang yang bertanggung jawab, tahu apa konsekuensi dari koalisi, ujarnya.

Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengatakan, partainya tak terlalu ambil pusing dengan nasib menteri-menteri dari PKS dalam kabinet. Menurutnya, para kader yang diangkat menjadi menteri sudah sepenuhnya menjadi milik publik.

Refrizal menyatakan, selama ini SBY kerap keliru menafsirkan perbedaan sikap antara menteri PKS di kabinet dengan kader PKS til DPR. SBY menganggap sikap kader PKS di DPR merepresentasikan sikap menteri PKS di kabinet. "Cara berpikir itu tidak nyambung, ujarnya.

ira sasmita/m akbar wijaya/ir-

fan fitrat ed: fitriyan zamzami



BAIKAN

7,56 ARREST PRESERVE

80,81

2.56

5,65

2.06

PKS Klaim Diamankan SB

 Dyah Ratna Meta Novia. M Akbar Wijaya

Sikap SBY yang tidak tegas dikhawatirkan merusak Setgab Koalisi.

JAKARTA — Silang pendapat antara PKS dan parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Ga-bungan (Setgab) Koalisi berujung antiklimaks. Juru Bicara PKS Mardani Alisera mengatakan, PKS tetap berada di koalisi hingga 2014 mendatang

Terkait dengan isu pencopotan menteri-menteri PKS di kabinet, Mardani mengatakan, PKS juga sudah berkomunikasi dengan SBY Se-jumlah elite PKS telah diundang untuk membahas hal tersebut. "Ka mi sepakat untuk menjaga koalisi hingga 2014 mendatang," katanya di Jakarta, Ahad. (23/6)

Mardani menyinggung, di luar perbedaan pendapat soal kenaikan harga BBM bersubsidi, PKS rajin mendukung program pemerintahan. Ia menegaskan, Fraksi PKS di DPR memang memiliki sikap yang ber-beda soal kebijakan kenaikan hanga BBM. Kendati demikian, menterimenteri dari PKS tetap bersikap

profesional mendukung program SBY

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai langkah SBY mempertahankan tiga menteri PKS di kabinet sellingai blander. Pilihan politik SBY tersebut bisa berdampak sistemis terhadap peniaku politik anggota koalisi lain

Ray mengatakan, partai lain yang memegang kunci koalisi, seperti Saya masih percaya akan ada hukuman Golkar, bisa tertular virus mbalelo yang dimiliki PKS, "Golkar bisa ikut-ikutan cari gara-gara dengan pemerintah. ujar Ray

Ray melihat SBY sedang mentanisatkan rumor konflik di internal PKS soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Presiden berharap pilihan politiknya mempertahankan tiga menteri PKS di kabinet bisa mem buat para menteri itu hijrah menjadi kader Demokrat. Jika analisis ini benar, kata Ray, pilihan politik SBY bakal banyak menghadapi tentang-an di internal Demokrat sendiri. Di sin lain Ray mengatakan, pa-

ra menteri PKS di kabinet semestinya patuh terhadap keputusan par-tai. Pasalnya, mereka tidak mungkin berada di kabinet tanpa peran politik PRS

pengurangan

menteri.

Anggota Majelis Syuro DFP PKS Refrigal mengatakan, partainya ti-dak akan memperusalkan mentari menteri mereka yang ingin telap bertahan di lingkaran kekuasaan Bagi PKS jahatan menteri meru-pakan hak prerogatif presiden sekaligus hak individu kader masing-masing. "PKS menyerahkan ke-pada menterinya, Karena

itu amanah dia Refrical di Jakarta

Menamit dia partanya tidak ingin mencampuri kebijakan po-litik SBY soal nasib menteri mereka di ka-binet. PKS juga tidak akan banyak protes bila kemudian SBY benar-benar mengeluarkan mereka

dari keanggotaan setgab. Refrizal menilai, kebijakan pe-litik SBY mempertahankan menteri PKS di kabinet tidak akan memecah belah soliditas internal PKS. Pasal-nya, ujar Refrizal, perbedaan sikap antara menteri PKS di kabinet yang mendukung kenaikan harga BBM dengan sikap Fraksi PKS di DPR yang menolak kenaikan harga BBM

sudah dipahami para kader PKS. Senada, Ketua DPP Demokrat. Sutan Bathoegana juga masih ber-harap SBY memberikan hukuman yang setimpal atas sikap politik mbalelo PKS. "Saya masih percaya akan ada hukuman pengurangan menteri," kata Sutan, kemarin

Sutan mengatakan, pengurang-an jatah menteri PKS di kabinet hanya tinggal menunggu waktu. Dia menduga SBY sedang mencari momentum yang tepat untuk mengumumkan masalah ini. "Ini soal momentum. Biasalah Pak SBY tunggu

suasana tenang dahulu," ujarnya Mempertahankan menteri PKS di kabinet, kata Sutan, bisa berdam-pak negatif terhadap politik internal setgah. Dia juga mengkhawatirkan sikap PKS ditiru-tiru partai lain. "Jangan PKS hajar di sana dapat di

sini," katanya. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin mengatakan, sikap PKS tidak akan ditiru Golkar Golkar akan tetap konsisten mengawal berbagat kebijakan peme rintah hingga 2014. "Bagi Gotkar koalisi adalah konsistensi menyangkut kontrak," ujarnya.

Pemilih Diabaikan

anyak 82,06 per-6,21 persen, dan

survei ini, parpolukung kenaikan newakiti aspirasi ngguh ironis," ka Alfaraby. Pemaampaikan di Ja

milih dari partai ikan harga BBM igan, PKS, Hanir a, sejalan dengai emilih PDI Per-R 69 person Sapersen. Hanura 85,88 persen, serta Gerindra 89,33 persen.

Adjie mengingatkan, nantinya parpol-parpol yang mendukung ke-naikan harga BBM akan memantautkan momentum pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Hati pernilib akan dicoba un-tuk dicuri kembali lewat program

Suron LSI dilakukan terhadap Suron LSI dilakukan terhadap Suron Surve dilakukan pada 18 Juni 2013, selepas rapat paripurna pengcsahan ARBN-P 2013 di DPR

Masil survei juga menunjukkan, 79,21 persen masyarakat tidak setuju kenaikan harga BBM. Sebanyak 19,10 person tidak tahu dan 1,69 per-

sen masyarakat setuju kenaikan harga BBM.

Warga desa kebanyakan menetak kenaikan harga BBM, Sebanyak 84,01 persen penduduk desa meno-tak kenaikan harga BBM, Sedangkan, penduduk kota yang menotak ke-naikan harga BBM 75,75 persen. "Hal ini wajar sebab masyarakat di pedesaan yang sangat terpengaruh de-ngan kenaikan harga BBM, kata

Tingkat penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga didominasi kaum perempuan. Sebanyak 81,20 persen perempuan menolak kenaikan harga BBM. Sedangkan, laki-taki yang menolak kenaikan harga BBM 76,80 persen. ••• Graph zamzami

Bertahan

THE PROPERTY AND PARTY OF THE P

SAMPLE SENSE A

Esthi Maharani, Muhammad Akbar Wijaya

SBY berangsur membaik. hubungan mereka dengan PKS justru mengklaim

sung mendapat bantahan. (PKS) menegaskan diri tetap berjajaran di kementenannya lang Suswono telah berpamikan dengan yang menyebut Menteri Pertanian tahan di pemerintahan. Kabar dari Partai Keadilan Sejahtera Tiga menteri

menyebutkan ia akan dicopot atau dirinya sebagai anggota Kabinet mendengar adanya isu pencupotan ditanggapi serius. Ia hanya tertawa pahkan mengundurkan diri dari Indonesia Bersatu (KIB) II. lajaran pemerintahan tak perlu Suswono mengaku, isu yang

pada orang yang pertama kali mengembuskan hal tersebut isu tersebut dikembalikan ke-Suswono justru meminta agar

> yang memberi informasi (soal Kepresidenan, Senin (24/6) bil berlalu di Kompleks Istana pengunduran diri)," katanya sam-Hahahaha. Tanya saja kepada

syuro PKS yang juga Menkomindo Suswono, anggota majous dewan (salah ucap)," katanya pemerintahan hingga tahun 2014 sagt ini tiga menteri PKS tetap isu tersebut. Menurutnya, hingija berkomitmen untuk menyukseskan Listul Semburing, membantah Gak benar itu (menteri sudah Tak jauh berbeda dengan Itu slip of tounge

tersebut terbukti dari masih ha-dirnya Suswono dalam acara bahwa koleganya itu masih menperingatan Hari Anti Narkoba jadi bagian dari kabinet. Hal no, Tifatul kembali menegaskan Negara, Senin sore. nternasional (HANI) di Istana Terkait isu dicopotnya Suswo-

ri Presiden Susilo Bambang tersebut, baik yang berasal dayang menegaskan pencopotan Yudhoyono (SBY) ataupun berasal ini belum ada surat keputusan Tifatul pun yakin, sampai saat

tersebut. ataupun membantah perihili isu memberikan pernyahaan resmi soat Pasha Lenggan membenarkan Juru Bıyara Presiden Julian Aldrin isu penguaduran diri Susweno

pernyataan," katanya. rt, saya belum bisa memberikan binet akan mengundurkan diteri dari salah satu partai di ka-"Kalau diberitakan ada men-

tergantung dari keputusan Presiyang akan disampaikan oleh beliau den SBY sendiri. dalam kabinet akan sangat (Presiden)," katanya. presiden "Saya menunggu apa tersebut merupakan hak prerogatil la mengatakan, posisi menteri Sebab, hal

karena permintaan pribadi menteri dilalui. Lazimnya, pengunduran din unduran diri menteri, ia melanjutkan, ada mekanisme yang harus Kalaupun ada rencana peng-

yung bersangkutan. PKS sendiri menyerahkan se

Keputusan (pencopotan) belum ada," katanya. dari kebijakan internal partai Salah ngomong itu. Tidak ada

Pihak istana sendiri belum bisa

di pemerintahan. mengaku menterinya tetap berada kepada SBY Hingga saat ini, PKS penuhnya soai posisi menterinya

dengan SBY," kata Ketua DPP rasa hubungan mereka dengan Publik PKS Mardani Ali Sera, Bidang Komunikasi dan Informasi melihat sudah lebih baik hubungan yang sudah dibengun ini tidak terlepas dari komunikasi SBY sudah berangsur membaik pimpinan PKS den SBY Kami pascapolemik kenaikan BBM. Hal Sebaliknya, PKS justru meantara

nikasi entare SBY dan PKS. menjelaskan bagaimana isi komu-Sayangnya, Mardani epggan

dicopotnya menteri PKS diembuslist Sejumlah politikus Partai agar posisi menteri PKS dicopot Demokrat, misalnya, mendorong kan sejumlah politikus partai koadilengserkannya Suswono. muncul informasi dari internal Keharga BBM. Di saat bersamaan, PKS terkait kebijakan kenaikan lni terkait sikap membangkang menterian Pertanian soal rencana Sebelumnya, kabar mengenai

■ ed: abdullah sammy

